

SKRIPSI

**PENGARUH PENGELOLAAN DANA DESA DAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(Studi Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik
Kabupaten Aceh Besar)**



Disusun Oleh:

**INTAN PUTRI ZAKIA
NIM. 200602084**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Intan Putri Zakia
NIM : 200602084
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 15 Juli 2024

Yang menyatakan,



Intan Putri Zakia

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Desa Lamme Garot, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar)

Disusun oleh:

Intan Putri Zakia

NIM: 200602084

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Ayumiati, S.E., M.Si., CTTI

NIP. 197806152009122002

Pembimbing II,

Azimah Dianah, SE., M. Si., Ak.

NIP. 198802262023212035

جامعة الرانيري

AR RANIRY
Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,

Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Desa Lamme Garot, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar)

Intan Putri Zakia
NIM: 200602084

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 15 Juli 2024 M
09 Muharram 1446 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Ayumilati, S.E., M.Si., CTT
NIP. 197806152009122002


Azimah Dianah, SE., M. Si., Ak.
NIP. 198802262023212035

Penguji I,

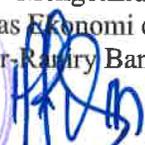
Penguji II,


Dr. Nilam Sari, M.Ag.
NIP. 197103172008012007


Hafidhah, S.E., M.Si., Ak. CA.
NIP. 198210122023212028

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Intan Putri Zakia
NIM : 200602084
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 200602084@student-ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

Pengaruh Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Desa Lamme Garot, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 Juli 2024

Mengetahui,

Penulis,


Intan Putri Zakia
NIM. 200602084

Pembimbing I,


Ayumiati S.E., M.Si., CTR
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II,


Azimah Dianah, SE., M. Si., Ak.
NIP. 198802262023212035

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam dicurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Skripsi dengan judul “Pengaruh Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Desa Lamme Garot, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar)” ditulis dalam rangka melengkapi dan memenuhi salah satu syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan guna mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penyusunannya. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah dengan izin Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Rina Desiana, M.E. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Hafiizh Maulana, SP., S.HI., ME. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Ayumiati, SE., M. Si. selaku pembimbing I dan Azimah Dianah, SE., M. Si., Ak. selaku pembimbing II, yang telah berkenan memberikan bimbingan, meluangkan waktu, serta memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Khairul Amri, SE., M. Si. selaku Penasehat Akademik (PA) penulis semalam menempuh pendidikan Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah.
6. Seluruh Dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, khususnya Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan, serta perhatiannya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

7. Segenap aparaturnya Desa Lamme Garot yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkaqit penelitian yang penulis lakukan.
8. Kedua orang tua Ayahanda tercinta Nirwansyah (Alm.) dan Ibunda tercinta Radiana serta adik tersayang Mohammad Agam Al-Isra serta keluarga besar yang telah mengiringi peneliti dengan doa, dukungan, dorongan dan kasih sayang.
9. Sahabat sejawat Jihan Wilda, Najwa Fathiya, Ataya Taskia, Salsabila Ajrina, Feby Qamara, Ghina Damayanti dan Munira Rosita. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu dengan tulus memberikan semangat dan doa bagi penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
10. Terakhir untuk diri sendiri, terima kasih atas kerja kerasnya.

Banda Aceh, 7 Juni 2024
Penulis

AR - RANIRY

Intan Putri Zakia

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

| No. | Arab | Latin | No. | Arab | Latin |
|-----|------|--------------------|-----|------|-------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | 16 | ط | Ṭ |
| 2 | ب | B | 17 | ظ | Ẓ |
| 3 | ت | T | 18 | ع | ' |
| 4 | ث | Ṣ | 19 | غ | G |
| 5 | ج | J | 20 | ف | F |
| 6 | ح | H | 21 | ق | Q |
| 7 | خ | Kh | 22 | ك | K |
| 8 | د | D | 23 | ل | L |
| 9 | ذ | Ẓ | 24 | م | M |
| 10 | ر | R | 25 | ن | N |
| 11 | ز | Z | 26 | و | W |
| 12 | س | S | 27 | ه | H |
| 13 | ش | Sy | 28 | ء | ' |
| 14 | ص | S | 29 | ي | Y |
| 15 | ض | D | | | |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي | <i>Fathah</i> dan ya | Ai |
| ◌َ و | <i>Fathah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كيف : *kāifa*

هول : *haul*

AR - RANIRY

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|--|-----------------|
| اَ / اِي | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | Ā |
| اِ | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | Ī |
| اُ | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i> | Ū |

Contoh:

قَالَ : *qāla*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/
alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Intan Putri Zakia
NIM : 200602084
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Pengelolaan Dana Desa dan
Pembangunan Infrastruktur terhadap
Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif
Ekonomi Syariah (Studi Desa Lamme Garot,
Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar)
Pembimbing I : Ayumiati, SE., M. Si.
Pembimbing II : Azimah Dianah, SE., M. Si., Ak.

Kesejahteraan menjadi isu umum dan suatu hal yang ingin dicapai oleh semua orang karena kesejahteraan berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Pemerintah baik pusat maupun daerah pasti memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan Dana Desa dan pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan responden sebanyak 88 orang. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer melalui pembagian kuesioner kepada masyarakat Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variable pengelolaan Dana Desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dan variabel pembangunan infrastruktur secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur, Kesejahteraan Masyarakat.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH..... | iii |
| PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI | iv |
| FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN | x |
| ABSTRAK..... | xiv |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR TABEL..... | xix |
| DAFTAR GAMBAR..... | xx |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xxi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 18 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 18 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 19 |
| 1.4.1 Manfaat Praktis (Operasional) | 19 |
| 1.4.2 Manfaat Teoritis (Akademis)..... | 20 |
| 1.5 Sistematika Pembahasan..... | 20 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | 22 |
| 2.1 Kesejahteraan Masyarakat | 22 |
| 2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat | 22 |
| 2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Masyarakat | 24 |
| 2.1.3 Langkah-Langkah Mencapai Kesejahteraan Masyarakat..... | 25 |
| 2.1.4 Indikator Kesejahteraan Masyarakat..... | 25 |
| 2.1.5 Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah | 28 |
| 2.1.6 Indikator Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah..... | 35 |
| 2.2 Pengelolaan Dana Desa..... | 39 |
| 2.2.1 Pengertian Pengelolaan Dana Desa..... | 39 |
| 2.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa | 43 |
| 2.2.3 Indikator Pengelolaan Dana Desa | 48 |

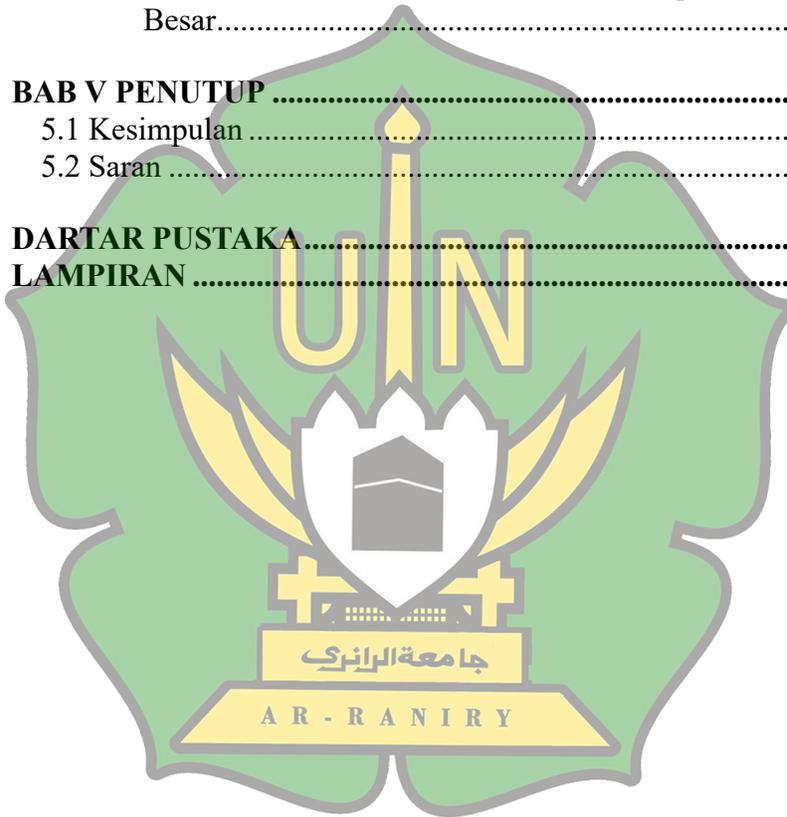
| | |
|--|-----------|
| 2.2.4 Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Syariah | 50 |
| 2.2.5 Indikator Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Syariah..... | 54 |
| 2.3 Pembangunan Infrastruktur..... | 55 |
| 2.3.1 Pengertian Pembangunan Infrastruktur | 55 |
| 2.3.2 Fungsi dan Tujuan Pembangunan Infrastruktur | 57 |
| 2.3.3 Indikator Pembangunan Infrastruktur | 58 |
| 2.3.4 Pembangunan Infrastruktur dalam Perspektif Ekonomi Syariah..... | 61 |
| 2.3.5 Indikator Pembangunan Infrastruktur dalam Perspektif Ekonomi Syariah..... | 64 |
| 2.4 Penelitian Terkait | 65 |
| 2.5 Kerangka Berpikir..... | 77 |
| 2.5.1 Pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat | 78 |
| 2.5.2 Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Kesejahteraan Masyarakat | 79 |
| 2.5.3 Pengaruh Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Kesejahteraan masyarakat.... | 81 |
| 2.7 Hipotesis Penelitian | 82 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 84 |
| 3.1 Desain Penelitian | 84 |
| 3.2 Jenis Data | 84 |
| 3.2.1 Data Primer..... | 85 |
| 3.2.2 Data sekunder..... | 85 |
| 3.3 Teknik Perolehan Data | 85 |
| 3.4 Populasi dan Sampel | 86 |
| 3.4.1 Populasi | 86 |
| 3.4.2 Sampel..... | 86 |
| 3.5 Metode Pengumpulan Data..... | 88 |
| 3.6 Skala Pengukuran..... | 88 |
| 3.7 Definisi Operasional Variabel Penelitian | 89 |
| 3.7.1 Kesejahteraan Masyarakat sebagai Y | 90 |
| 3.7.2 Pengelolaan Dana Desa sebagai X1 | 92 |
| 3.7.3 Pembangunan Infrastruktur sebagai X2 | 94 |
| 3.8 Instrumen Penelitian | 96 |

| | |
|---|-----|
| 3.8.1 Uji Validitas..... | 96 |
| 3.8.2 Uji Reliabilitas..... | 97 |
| 3.9 Uji Asumsi Klasik..... | 98 |
| 3.9.1 Uji Normalitas..... | 98 |
| 3.9.2 Uji Multikolinearitas..... | 99 |
| 3.9.3 Uji Heteroskedestisitas..... | 99 |
| 3.10 Analisis Regresi Linear Berganda..... | 100 |
| 3.11 Uji Hipotesis..... | 101 |
| 3.11.1 Uji Parsial (Uji t)..... | 101 |
| 3.11.2 Uji Simultan (Uji F)..... | 101 |
| 3.11.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)..... | 102 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 103

| | |
|---|-----|
| 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian..... | 103 |
| 4.1.2 Sejarah Desa Lamme Garot..... | 106 |
| 4.2 Karakteristik Responden..... | 107 |
| 4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 107 |
| 4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia..... | 108 |
| 4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir..... | 109 |
| 4.3 Uji Instrumen Penelitian..... | 110 |
| 4.3.1 Uji Validitas..... | 110 |
| 4.3.2 Uji Reliabilitas..... | 114 |
| 4.4 Uji Asumsi Klasik..... | 115 |
| 4.4.1 Uji Normalitas..... | 115 |
| 4.4.2 Uji Multikolinearitas..... | 117 |
| 4.4.3 Uji Heteroskedestisitas..... | 118 |
| 4.5 Hasil Regresi Linear Berganda..... | 119 |
| 4.6 Uji Hipotesis..... | 122 |
| 4.6.1 Pengujian Secara Parsial (Uji t)..... | 122 |
| 4.6.2 Uji Simultan (Uji F)..... | 123 |
| 4.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)..... | 124 |
| 4.7 Pembahasan..... | 125 |
| 4.7.1 Pengaruh Pengelolaan DD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar..... | 125 |

| | |
|---|------------|
| 4.7.2 Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar | 128 |
| 4.7.3 Pengaruh Pengelolaan DD dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar..... | 131 |
| BAB V PENUTUP | 134 |
| 5.1 Kesimpulan | 134 |
| 5.2 Saran | 134 |
| DARTAR PUSTAKA..... | 136 |
| LAMPIRAN | 143 |



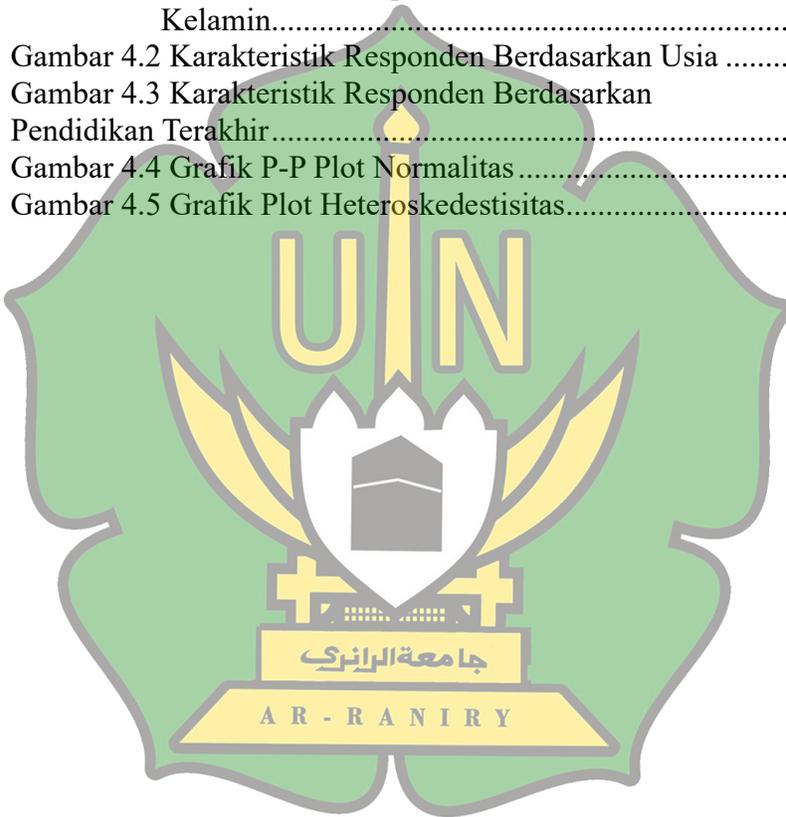
DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 1.1 Jumlah Dana Desa di Aceh Besar tahun 2019-2023. | 5 |
| Tabel 1.2 Jumlah Penduduk PerDesa Mukim Bukit Baro | 7 |
| Tabel 2.1 Penelitian Terkait | 70 |
| Tabel 3.1 Skala <i>Likert</i> | 89 |
| Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian..... | 95 |
| Tabel 4.1 Luas Lahan menurut Jenis Penggunaan Tahun 2016 | 103 |
| Tabel 4.2 Uji Validitas Variabel X1 | 111 |
| Tabel 4.3 Uji Validitas Variabel X2 | 112 |
| Tabel 4.4 Uji Validitas Variabel Y | 113 |
| Tabel 4.5 Uji Reliabilitas | 115 |
| Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas | 116 |
| Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas | 118 |
| Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Berganda..... | 120 |
| Tabel 4.9 Hasil Uji Secara Parsial (Uji T)..... | 122 |
| Tabel 4.10 Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)..... | 124 |
| Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R ²) | 125 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----|
| Gambar 1.1 Jumlah Dana Desa di Desa Lamme Garot tahun 2019-2023 | 9 |
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran | 81 |
| Gambar 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 108 |
| Gambar 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia | 109 |
| Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir..... | 110 |
| Gambar 4.4 Grafik P-P Plot Normalitas | 117 |
| Gambar 4.5 Grafik Plot Heteroskedestisitas..... | 119 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| Lampiran 1 Kuesioner Penelitian | 143 |
| Lampiran 2 Tabulasi Kuesioner Penelitian..... | 150 |
| Lampiran 3 Karakteristik Responden | 159 |
| Lampiran 4 Hasil Analisis Output | 160 |
| Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian | 172 |
| Lampiran 6 Riwayat Hidup | 175 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia salah satu negara republik yang pemerintahannya terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk daerah terbagi atas provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Pada kecamatan juga terdapat pemerintahan kecil yang di sebut dengan desa (gampong). Indonesia juga mengalami beberapa perubahan dalam sistem pemerintahan sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat dan pengelolaan sistem pemerintahan (Ayumiati et al., 2019). Saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan bangsa. Kesejahteraan merupakan hal yang diinginkan oleh semua orang, mencakup unsur-unsur seperti keadilan, kenyamanan, ketentraman, ketertiban dan kehidupan yang teratur disertai dengan tujuan yang luas yaitu keadilan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat (Mlik, 2022). Kesejahteraan menjadi isu umum karena kesejahteraan berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Seperti yang tertera dalam UUD 1945 bahwa pemerintah pusat maupun daerah memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat menunjukkan tanda hadir dan seriusnya pemerintah dalam penyelenggaraan suatu negara.

Kesejahteraan merupakan suatu aspek yang ingin dicapai oleh semua orang, pemerintah pusat maupun daerah tentunya

memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana yang dinyatakan dalam UUD 1945. Kondisi kesejahteraan ini tidak lepas dari keberhasilan atas pembangunan yang dilaksanakan suatu desa, yang mana pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan UU Desa Tahun 2014 dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan segala bentuk kebutuhan dasar serta pembangunan sarana dan prasarana. Pengembangan potensi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan juga berpengaruh besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam Pasal 78 juga disebutkan program pembangunan desa menjadi prioritas pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta pengembangan ekonomi lokal dengan pemanfaatan sumber daya alam sehingga dapat meningkatkan mutu hidup masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan dimana penduduk suatu wilayah dapat menikmati taraf hidup yang layak, memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, dan merasakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kesejahteraan masyarakat melibatkan berbagai faktor, termasuk ekonomi, sosial, dan kesehatan. Peningkatan pendapatan, akses pendidikan, pelayanan kesehatan yang baik, serta keamanan merupakan elemen-elemen penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik, pembangunan infrastruktur, dan

partisipasi aktif masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan.

Kemajuan dan kesejahteraan sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desanya. Adanya proses pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama di pedesaan merupakan strategi pembangunan Indonesia saat ini. Pembangunan desa tidak hanya sebagai objek, tetapi juga subjek pembangunan, pembangunan desa merupakan subjek pembangunan dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik (Fadliyati et al., 2023). Melalui Upaya tersebut diharapkan dapat terjadinya transformasi signifikan dalam aspek ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat pedesaan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan keseluruhan negara. Diketahui bahwa Sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan, dengan jumlah penduduk dan komponen alam yang potensial akan mendapatkan aset melalui Dana Desa (DD).

DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat. Dengan adanya DD, diharapkan membantu terlaksananya program pemerintahan desa dalam pembangunan

desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Sukma & Puspitasari, 2023). Untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi semua pihak (kemaslahatan), proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat harus melibatkan masyarakat desa secara aktif. Keterlibatan ini harus dimulai dari tahap perencanaan, di mana masyarakat memberikan ide dan pendapat mereka tentang apa yang diperlukan dan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Selanjutnya, saat proyek pembangunan berjalan, masyarakat harus ikut memantau dan mengawasi jalannya proyek untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana dan tidak terjadi penyelewengan. Selain keterlibatan aktif, masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana pembangunan digunakan. Transparansi dalam pengelolaan dana adalah kunci agar masyarakat bisa melihat dengan jelas alokasi dan penggunaan dana tersebut. Ini berarti pemerintah desa harus terbuka dalam memberikan informasi tentang sumber dana, jumlah yang diterima, serta rincian pengeluarannya. Dana yang disalurkan untuk pembangunan desa seharusnya mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang meliputi 'adl (keadilan), transparansi dan ma'ad (tanggung Jawab). Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan dana yang dialokasikan untuk pembangunan desa dapat digunakan secara efektif dan efisien, sehingga membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat desa dan mencegah terjadinya korupsi atau penyelewengan.

Tabel 1.1
Jumlah Dana Desa di Aceh Besar tahun 2019-2023

| Tahun | Aceh Besar (Rupiah) |
|-------|---------------------|
| 2019 | 438,520,000,000 |
| 2020 | 437,560,000,000 |
| 2021 | 437,560,000,000 |
| 2022 | 415,520,000,000 |
| 2023 | 422,290,000,000 |

Sumber: www.kemenkue.go.id (2023)

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa jumlah DD di Aceh Besar terus menurun dari tahun 2019 sejumlah 438,520,000,000 hingga 2022 sejumlah 415,520,000,000, namun sedikit meningkat pada tahun 2023 yaitu sejumlah 422,290,000,000. Dengan DD yang besar tersebut seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang sudah direncanakan.

Penggunaan DD dilaksanakan dengan adanya pemantauan dari pemerintah melalui bupati, pemda, dan pusat (Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Kementerian Perdagangan). Bupati bertanggung jawab untuk memastikan bahwa DD disalurkan tanpa penundaan kepada setiap desa. Pemda berfungsi untuk memastikan bahwa DD yang disalurkan berjalan tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat. Dan yang terakhir pemerintah pusat bertugas untuk mengetahui pemanfaatan DD melalui program apa saja yang akan dilakukan amupun telah dilakukan oleh desa. DD yang didapat harus dikelola secara maksimal guna memenuhi kebutuhan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Setelah DD tersalurkan seluruhnya, setiap desa dapat menjalankan program-program yang sudah didiskusikan dan dirancangan sebelumnya. Sesuai dengan amanat Permendes yang menyatakan bahwa DD diprioritaskan untuk membiayai belanja baik dalam pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa. Efektivitas penggunaan DD di Aceh Besar dievaluasi setiap tahunnya untuk memastikan program yang direncanakan berjalan dengan baik.

Kecamatan Montasik adalah wilayah yang menggabungkan tradisi budaya yang kuat, kehidupan religius, ekonomi agraris, dan komunitas yang solid. Kehidupan religius di sini sangat kental, dengan masjid dan pesantren yang memainkan peran sentral. Ekonomi agraris menjadi tulang punggung utama perekonomian masyarakat Montasik, di mana mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, seperti penanaman padi, tanaman pangan, dan peternakan. Hasil pertanian dari Montasik tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga dijual ke pasar yang lebih luas, sehingga berkontribusi pada perekonomian daerah. Secara keseluruhan, sektor agraris merupakan fondasi ekonomi yang kuat bagi Montasik untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Kecamatan ini terdiri dari tiga pemukiman: Mukim Montasik, Mukim Bukit Baro, dan Mukim Piyeung. Desa Lamme Garot merupakan salah satu dari 14 desa yang ada di Mukim Bukit Baro dan terletak ditengah kecamatan.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk PerDesa Mukim Bukit Baro

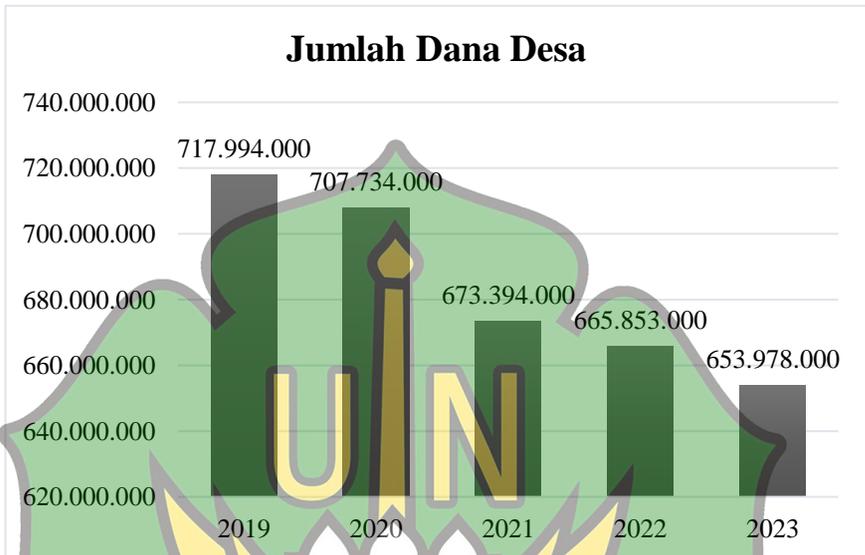
| Nama Desa | Jumlah Penduduk |
|---------------------|------------------------|
| Atong | 1.232 Jiwa |
| Reudeup | 931 Jiwa |
| Teubang Phui Mesjid | 903 Jiwa |
| Lamme Garot | 750 Jiwa |
| Teubang Phui Baro | 629 Jiwa |
| Weubada | 614 Jiwa |
| Bak Ciri | 480 Jiwa |
| Warabo | 480 Jiwa |
| Empee Tanong | 480 Jiwa |
| Bueng Tujoh | 474 Jiwa |
| Bira Cot | 437 Jiwa |
| Meunasah Tutong | 420 Jiwa |
| Bira Lhok | 389 Jiwa |
| Peurumping | 314 Jiwa |

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Besar (2022)

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti memilih Desa Lamme Garot sebagai objek penelitian dengan jumlah penduduk paling banyak keempat pada Mukim Bukit Baro. Beberapa masyarakat di Desa Lamme Garot menyatakan bahwa pemerintah desa setempat telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan berbagai program pembangunan infrastruktur di wilayah mereka. Infrastruktur ini mencakup berbagai proyek seperti perbaikan jalan,

pembangunan fasilitas umum, dan peningkatan akses air bersih. Pelaksanaan program pembangunan tersebut tidak dilakukan secara sepihak. Sebaliknya, pemerintah desa melibatkan masyarakat melalui musyawarah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan. Proses musyawarah ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, sehingga program yang diusulkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Hasil dari musyawarah ini kemudian diajukan kepada pemerintah desa sebagai rencana pembangunan desa yang terstruktur dan terarah, namun meskipun ada upaya bersama dari pemerintah desa dan masyarakat, terdapat tantangan signifikan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program ini. Salah satu tantangan utama adalah penurunan aliran DD yang signifikan selama lima periode dari tahun 2019-2023. Penurunan ini berdampak langsung pada anggaran yang tersedia untuk melaksanakan berbagai proyek pembangunan yang telah direncanakan. Akibatnya, beberapa program terpaksa ditunda atau dilaksanakan dengan skala yang lebih kecil dari yang direncanakan sebelumnya. Berikut DD yang diperoleh Desa Lamme Garot yaitu:

Gambar 1.1
Jumlah Dana Desa di Desa Lamme Garot tahun 2019-2023



Sumber: Kantor Desa Lamme Garot (2023)

Berdasarkan Gambar 1.1 diketahui bahwa jumlah DD yang diberikan pemerintah Aceh Besar untuk Desa Lamme Garot menurun setiap tahunnya. Penurunan dana tersebut dikarenakan dapat berupa pemerintah pusat atau daerah mengalami defisit anggaran ataupun pada Desa Lamme Garot sudah meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara signifikan sehingga adanya kebijakn dari pemerintah untuk menurunkan DD yang akan diberikamn. Namun desa tetap mengalokasikan DD untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, DD salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, perhitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan memperhitungkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas

wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Meskipun program dana desa telah diluncurkan dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan di pedesaan, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan terkait efektivitas alokasi dan pemanfaatan dana tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Onthoni & Kewo (2022) dan penelitian yang peneliti lakukan memiliki beberapa perbedaan, seperti pada objek penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Inobonto 2, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Lamme Garot. Perbedaan lainnya terletak pada jumlah sampel penelitian, di mana penelitian sebelumnya melibatkan 75 responden, sedangkan penelitian ini melibatkan 88 responden. Selain itu, ada jarak waktu dua tahun antara kedua periode penelitian. Penelitian ini juga secara khusus mengkaji dari perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara pengelolaan DD dan pembangunan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Inobonto 2. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah hasil yang sama juga terjadi di Desa Lamme Garot.

Pemerintah melakukan pembangunan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui penyediaan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur bertujuan mengembangkan desa agar dapat meningkatkan laju perekonomian antar desa. Infrastruktur yang baik meningkatkan perekonomian

daerah dengan menyediakan fasilitas yang memadai dan mempermudah akses pendistribusian barang maupun jasa (Mlik, 2022). Sejalan dengan pendapat (Otheliansyah & Yasni, 2021) bahwa penggunaan DD diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan pembinaan masyarakat desa agar kualitas sumber daya manusia di kabupaten daerah tertinggal dapat meningkat. Pembangunan adalah proses perencanaan sosial yang dilakukan oleh para perencana pembangunan untuk menciptakan perubahan sosial sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur mencakup sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, bangunan, dan fasilitas publik lainnya seperti listrik, telekomunikasi, dan air bersih, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur yang baik dan merata sangat membantu keberhasilan usaha masyarakat, terutama bagi mereka yang ekonominya rendah dan infrastrukturnya masih terbatas. Di wilayah yang sedang berkembang, pemberdayaan masyarakat terjadi sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut, sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat (Sukma & Puspitasari, 2023). Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Dengan adanya peraturan tentang pengelolaan dan prioritas penggunaan

DD, pemerintah berharap DD dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraannya. Sebagaimana dinyatakan dalam penelitian (Fajri, 2017) pembangunan infrastruktur jalan memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Islam menjelaskan persoalan pembangunan serta pemberdayaan melalui surat Ar-Ra'd (13) ayat 11, yang artinya bahwa *"Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia."* (QS. Ar-Ra'd 13: Ayat 11).

Menurut tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish Shihab ayat diatas berbicara tentang dua pelaku perubahan. Pelaku pertama adalah Allah swt yang mengubah nikmat yang dianugerahkan-Nya kepada suatu masyarakat, sedangkan pelaku kedua adalah manusia yang melakukan perubahan. Perubahan yang terjadi menyangkut banyak hal seperti kekayaan dan kemiskinan, Kesehatan dan penyakit, kemuliaan dan kehinaan, persatuan atau perpecahan dan lain-lain yang berkaitan dengan masyarakat secara umum. Ayat tersebut juga menekankan bahwa perubahan yang dilakukan oleh Allah swt

haruslah didahului oleh perubahan masyarakat menyangkut sisi dalam mereka. Tanpa perubahan ini mustahil akan terjadi perubahan sosial. Karena sisi dalam manusia adalah yang melahirkan aktivitas, baik positif maupun negative, sifat serta corak aktivitas itulah yang mewarnai keadaan masyarakat.

Dalam Islam, pembangunan ekonomi menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar untuk melindungi lima aspek utama (*maqashid Syariah*), yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda (Suardi, 2021). Setiap kelompok maupun individu memiliki hak untuk mempertahankan keberadaannya dan menjalankan peran utamanya sebagai khalifah di bumi. Untuk mencapai kesejahteraan hidup bagi masyarakat, pembangunan ekonomi dalam Islam menempatkan manusia sebagai objek maupun subjek dalam proses pembangunannya. Hal ini dikarenakan manusia adalah pelaku utama dalam kehidupan itu sendiri dan manusia juga memiliki peran sentral yang tidak hanya sebagai pengguna manfaat dari hasil pembangunan, tetapi juga sebagai penggerak yang menentukan arah dan keberhasilan pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada pertumbuhan material semata, tetapi juga pada pengembangan kapasitas manusia dan peningkatan kualitas hidup.

Desa Lamme Garot merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Kecamatan Montasik sendiri terdiri dari 39 Desa. Desa Lamme Garot

sebagaimana desa lainnya merupakan salah satu desa yang turut mendapatkan DD sebagai dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah. DD pada masyarakat di Desa Lamme Garot diharapkan mampu untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan kajian mendalam tentang masalah dan perkembangan yang terjadi dalam pengelolaan DD untuk menelusuri berbagai pengaruh pengelolaan DD dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana pengelolaan DD dalam program desa sehingga tujuan pemerintah mengalokasikan dana Pemerintah Pusat dan Daerah bisa membantu program desa dan tujuan Pemerintah terwujud demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data serta penjabaran diatas dapat diketahui bahwa DD yang diberikan kepada Desa Lamme Garot menurun setiap tahunnya. Hal tersebut menarik perhatian peneliti, apakah persediaan infrastruktur Desa Lamme Garot sudah baik dan kesejahteraan masyarakat sudah tercapai sehingga pemberian DD diperkecil. Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, untuk merasakan manfaat secara optimal dari penggunaan DD, maka diperlukan usaha dan kerja keras dari aparatur-aparatur pemerintahan dan juga seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, pasar, pertanian dan irigasi juga dibutuhkan yang merupakan penunjang sehingga dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Ada beberapa penelitian yang berkaitan telah dilakukan diantaranya (Goan & Luju, 2023) dengan hasil penelitian bahwa pengaruh pengelolaan DD Meken Detung Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka, bahwa variabel independent yaitu DD berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Meken Detung Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka, sedangkan (Onthoni & Kewo, 2022) dengan hasil Terdapat Pengaruh positif dan signifikan antara Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Inobonto 2. Selanjutnya juga ada (Pakaya et al., 2023) dengan hasil penelitian bahwa DD berpengaruh positif signifikan terhadap Pembangunan Desa di Desa Popalo Kecamatan Angrek Kabupaten Gorontalo Utara. Hasil ini dapat menjelaskan bahwa dengan diterapkannya DD oleh Pemerintah maka dapat meningkatkan Pembangunan Desa Popalo Kecamatan Angrek Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian yang dilakukan oleh (Supriadi et al., 2020) dengan hasil penelitian bahwa variabel DD signifikan dan bersifat positif terhadap Pembangunan Infrastruktur, sedangkan Belanja Modal signifikan dan bersifat positif terhadap Pembangunan Infrastruktur, dan Jumlah Penduduk tidak signifikan dan bersifat negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan variabel DD akan meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, setiap kenaikan Belanja Modal akan meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, sedangkan setiap penurunan Jumlah Penduduk akan meningkatkan

Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Nglegok tahun 2015-2019. Berikutnya juga ada penelitian dari (Nathania & Siringoringo, 2019) dengan hasil penelitian bahwa Pengelolaan DD dapat membantu desa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang sosial ekonomi pada desa Pamatang Sakhuda dikelola untuk pembangunan infrastruktur jalan dan parit.

Terdapat hasil yang berbeda dari beberapa penelitian yang dilakukan dengan sejumlah penelitian di atas, selain itu juga belum terdapat analisis komprehensif terhadap pengaruh pengelolaan DD dan pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah khususnya pada Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar serta menjadi pijakan untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini. Relevansi penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah adanya penelitian mengenai DD, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada lokasi penelitian, periode waktu, data penelitian, variable penelitian, objek penelitian dan pada penelitian ini secara khusus menggunakan perspektif ekonomi syari'ah yang mana pada penelitian terdahulu menggunakan perspektif ekonomi konvensional.

Dalam penelitian ini diangkat tema tentang kesejahteraan masyarakat karena di Kecamatan Montasik terdiri 3 mukim dengan

total 39 desa, salah satu desa yang akan peneliti teliti adalah Desa Lamme Garot yang termasuk dalam Mukim Bukit Baro. Letak desa yang cukup strategis yang berdekatan dengan mesjid mukim sehingga banyaknya masyarakat melewati daerah tersebut, dan juga sudah banyaknya kedai kopi atau umkm masyarakat sehingga menarik masyarakat desa sekitarnya. Sehingga peneliti ingin mengetahui apakah pengelolaan DD dan pembangunan infrastruktur desa tersebut sudah berjalan dengan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan ketentuan konsep ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan keberadaan dari penelitian (Onthoni & Kewo, 2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengkaji lagi kedalam perspektif ekonomi Islam serta unit analisis dan periode penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Periode dalam penelitian ini dilakukan pada tahun 2024 dengan menggunakan metode analisis Regresi Linear Berganda. Berdasarkan penjabaran diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Desa Lamme Garot, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang timbul terkait penelitian ini adalah:

1. Apakah pengelolaan dana desa secara parsial berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dalam perspektif ekonomi syariah?
2. Apakah pembangunan infrastruktur secara parsial berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dalam perspektif ekonomi syariah?
3. Apakah pengelolaan dana desa dan pembangunan infrastruktur secara simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dalam perspektif ekonomi syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijabarkan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa secara parsial berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dalam perspektif ekonomi syariah.

2. Untuk mengetahui pembangunan infrastruktur secara parsial berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dalam perspektif ekonomi syariah.
3. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa dan pembangunan infrastruktur secara simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dalam perspektif ekonomi syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi semua pihak secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Praktis (Operasional)

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan DD dan pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan sebagai pedoman maupun bahan bacaan untuk menambah wawasan mahasiswa mengenai pengaruh pengelolaan DD dan pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan tema dan topik yang serupa.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian serupa mengenai pengelolaan DD dan pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai hasil penelitian sebelumnya dan dapat menjadi dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Teoritis (Akademis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memahami bagaimana pengelolaan DD dan pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan pedoman program pengelolaan DD. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat kepada masyarakat sehingga mengetahui sejauh mana kesejahteraan masyarakat telah tercapai. Penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan dalam menentukan program yang dapat semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi gambaran umum penelitian yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini merupakan bagian yang menjelaskan teori yang berhubungan dengan penelitian dan masalah yang berkaitan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang mengaitkan dengan kerangka teori atau penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kesejahteraan Masyarakat

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Dalam UUD 1945, pemerintah pusat dan daerah memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu Upaya yang dijalankan ialah melalui pembangunan, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan UU Desa, yaitu mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat desa, pemerintah berupaya memberikan bimbingan serta pelatihan (Soimin, 2019). Idealnya, aturan yang mengatur kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa harus mencakup berbagai aspek penting. Regulasi tentang kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa idealnya harus mencakup beberapa aspek utama. Pertama, tata kelola pemerintahan desa perlu diatur secara rinci untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan desa. Kedua, aspek kewenangan dan kedudukan pemerintah desa harus jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Ketiga, pembangunan dan keuangan desa harus diatur dengan baik untuk memastikan bahwa desa memiliki sumber daya yang cukup dan digunakan secara efisien untuk pembangunan yang berkelanjutan (Soimin, 2019).

Kesejahteraan adalah kondisi dimana terciptanya unsur keamanan, keadilan, ketertiban, ketentraman, kemakmuran, serta

kehidupan yang teratur. Tujuannya tidak hanya menciptakan ketertiban dan keamanan tetapi juga memastikan keadilan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Keadaan yang aman akan terciptanya sosiologis dan psikologis yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi hidup dengan rasa tentram, mandiri, dan bebas dari rasa takut dalam menjalani kehidupan dan menghadapi masa depan merupakan bagian dari kesejahteraan (Soetomo, 2014). Menurut (Soimin, 2019), kemandirian masyarakat desa adalah alat dan jalur (roadmap) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Kemandirian desa dipengaruhi oleh karakteristik masyarakatnya, termasuk tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi (Rosidin, 2019).

Menurut (Soimin, 2019), kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua komponen utama. Pertama, penyediaan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Kedua, pengembangan ekonomi masyarakat dengan mempertimbangkan potensi atau kemampuan yang ada pada desa. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa yang maksimal, keterlibatan tidak hanya diperlukan dari pemerintah desa, tetapi juga dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa sebagai subjek pembangunan pedesaan. Selain itu, adanya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah berupa kebijakan sangat diperlukan, terutama dalam mendukung pelaksanaan program yang sudah dirancang terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan di masyarakat.

(Rosidin, 2019) juga mengatakan bahwa pembangunan desa dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar. Ini termasuk dalam pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi desa, serta pemanfaatan sumber daya dan lingkungan. Undang-Undang sendiri mengadopsi dua pendekatan, yaitu "membangun desa" dan "desa membangun," yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Kesejahteraan sering dikaitkan dengan konsep kualitas hidup, yang mencerminkan keadaan kehidupan yang baik dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada, terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan perhatian terhadap kehidupan. Konsep kesejahteraan tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik individu atau keluarga, tetapi juga kebutuhan psikologisnya.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari penerapan kebijakan anggaran DD yang telah dirancang. Dalam penerapan kebijakan tersebut, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh aparat desa bersama dengan masyarakat (Elvina dan Musdhalifah, 2018).

Menurut (Rahman, 2018), pembangunan kesejahteraan juga merupakan salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Perencanaan dan strategi pembangunan kesejahteraan di bidang sosial sangat penting agar konsep

kesejahteraan yang didasarkan pada sejarah dan teori dapat diimplementasikan dengan efektif dan optimal.

2.1.3 Langkah-Langkah Mencapai Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mencapai kesejahteraan tidaklah mudah, dibutuhkan program-program yang tepat sasaran, salah satunya adalah program DD. Program ini telah dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka kemiskinan dan fokus pada pencapaian kesejahteraan serta kemandirian masyarakat miskin di pedesaan. Berikut adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam mencapai kesejahteraan (Sumarni, 2020):

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.
3. Kelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
4. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal.

2.1.4 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Dalam mengukur tercapainya pembangunan di suatu wilayah, dibutuhkan indikator-indikator yang mampu mengukur kesejahteraan rakyat dan dijadikan landasan ukuran keberhasilan. Indikator kesejahteraan rakyat bersifat luas, multidimensional, dan kompleks, sehingga taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat dinilai melalui indikator-indikator terukur dari berbagai aspek.

Menurut (Kolle, 1974) dalam (Nurohman et al., 2019), kesejahteraan masyarakat dapat diketahui melalui beberapa aspek kehidupan, diantaranya:

1. Kualitas hidup dari segi materi, meliputi keadaan tempat tinggal dan pemenuhan gizi pada pangan.
2. Kualitas hidup dari segi fisik, meliputi kesehatan dan keadaan lingkungan sekitar.
3. Kualitas hidup dari segi mental, meliputi fasilitas Pendidikan.
4. Kualitas hidup dari segi spiritual, meliputi moral, etika dan keserasian penyesuaian.

Menurut (Soimin, 2019) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta kualitas hidup yang baik serta upaya dalam penanggulangan kemiskinan dalam desa dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

1. Penyediaan pemenuhan serta kebutuhan dasar masyarakat.
2. Pembangunan sarana dan prasarana desa setempat.
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal yang ada dalam desa.
4. Pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan yang berkelanjutan.

Menurut (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023) indikator kesejahteraan terdapat beberapa aspek yaitu:

1. Kependudukan.
2. Kesehatan.
3. Pendidikan.
4. Perumahan dan lingkungan.
5. Sosial budaya.

Indikator kesejahteraan menurut (Soetomo, 2014) mengandung tiga komponen yaitu:

1. Keadilan sosial mengandung sejumlah indikator yaitu: pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air, penduduk miskin.
2. Keadilan ekonomi mengandung sejumlah indikator yaitu: pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pengeluaran.
3. Keadilan demokrasi mengandung sejumlah indikator yaitu: rasa aman dan akses informasi.

Dari keempat indikator diatas, penulis memilih menggunakan indikator menurut (Kolle, 1974) dalam (Nurohman et al., 2019), karena keempat poin indikator menurut Kolle (1974) tersebut menjelaskan dengan mudah dan mampu memahami sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat sudah tercapai. Indikator tersebut juga berhubungan dengan setiap prinsip kesejahteraan dalam perspektif syariah. Berikut indikator menurut (Kolle, 1974) yang dikaitkan dengan perspektif syariah:

1. kualitas hidup dari segi materi meliputi keadaan tempat tinggal dan pemenuhan gizi pada pangan. Indikator tersebut berhubungan dengan salah satu prinsip kesejahteraan dalam Islam yaitu memelihara jiwa, yang apabila tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut dapat mengancam kehidupan atau jiwa seseorang.
2. Kualitas hidup dari segi fisik meliputi kesehatan dan keadaan lingkungan sekitar. Indikator tersebut berhubungan dengan

salah satu prinsip kesejahteraan dalam Islam yaitu memelihara jiwa, yang mana fasilitas kesehatan dapat membantu terciptanya masyarakat yang Sejahtera.

3. Kualitas hidup dari segi mental, meliputi fasilitas pendidikan. Indikator tersebut berhubungan dengan salah satu prinsip kesejahteraan dalam Islam yaitu memelihara akal, dengan adanya pendidikan akan terciptanya mental dan pribadi yang baik.
4. Kualitas hidup dari segi spiritual meliputi moral, etika dan keserasian penyesuaian. Indikator tersebut berhubungan dengan salah satu prinsip kesejahteraan dalam Islam yaitu memelihara harta, adanya larangan mengambil hak orang lain.

2.1.5 Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam atau ekonomi berbasis syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang bertujuan utama untuk kesejahteraan umat. Sistem ini berpedoman penuh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Islam menghendaki kesejahteraan yang mencakup keseluruhan unsur, tidak hanya diukur dari aspek materialnya, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, mental, dan spiritual individu, serta dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan (Suardi, 2021). Kesejahteraan dengan menerapkan sistem ekonomi Islam adalah sistem yang mengadopsi dan memasukkan nilai-nilai, norma, dan

ajaran Islam (variable keimanan) sebagai unsur fundamental dalam mencapai kesejahteraan.

Menurut Umer Chapra dalam (Sodiq, 2015), tujuan ekonomi Islam selalu berhubungan dengan tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam yaitu mewujudkan *falah*, yaitu dengan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Penjelasan tersebut merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang secara mendasar berbeda dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang bersifat sekuler dan materialistik.

Dalam bahasa syaria, *falah* sering dinyatakan dengan istilah *maslahah*. *Maslahah* merujuk pada perbuatan yang mengandung kebaikan dan manfaat. Secara terminologi, menurut al-Ghazali, *maslahah* dapat dijelaskan sebagai "menarik manfaat atau menghindari *madharat* (kerugian) dalam rangka menjaga tujuan syaria". Dengan demikian, *maslahah* merupakan segala sesuatu yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Menurut al-Ghazali, kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (*Maqasid al-Shari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materi dan rohani. Aktivitas ekonomi menurut Islam adalah ibadah dan dalam rangka mengabdikan kepada Allah swt yang

mengacu pada tujuan syariat Islam dengan 5 prinsip dasar yang terkandung dalam *al-maqoshid as-syari'ah*, yaitu terjaminnya agama (*ad-ddin*), terjaminnya jiwa (*an-nafs*), terjaminnya akal (*al-aql*), terjaminnya keturunan (*an-nasl*), dan terjaminnya harta (*al-mal*) dari segala sesuatu yang merusak sehingga tercapai kehidupan yang baik dan terhormat (*hayatan toyyibah*) dunia dan akhirat.

Menurut Al-Qur'an, tujuan kehidupan manusia pada akhirnya adalah *falah* di akhirat, sedangkan *falah* di dunia hanya merupakan tujuan antara (yaitu sarana untuk mencapai *falah* akhirat). Allah Swt berfirman dalam Surat Al-Qasas ayat 77.

وَأَتَّبِعْ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاتَّخِذْ لَكَ دِينًا حَسَنًا مِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْصُرْ مَثَلًا يَكُونُ خَيْرًا لِمِمَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسْأْدَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

Artinya: "Dan carilah (*pahala*) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (*kepada orang lain*) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qasas 28: Ayat 77).

Menurut tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish Shihab ayat diatas menjelaskan dalam pandangan Islam hidup duniawi dan ukhrawi merupakan satu kesatuan. Beberapa orang dari kaum Nabi Musa itu melanjutkan nasihat itu bukan berarti manusia hanya boleh

beribadah murni dan tidak melarang manusia untuk memerhatikan dunia. Manusia harus berusaha sekuat tenaga dan pikiran dalam batas yang dibenarkan oleh Allah untuk memperoleh harta dan hiasan duniawi. Oleh karena itu carilah dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuanmu dan hasil dari usahamu itu akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan bekal di akhirat. Jika ajaran Islam diterapkan secara menyeluruh dan sungguh-sungguh (*kaffah/comprehensive*), niscaya akan tercapai *falah* di dunia dan di akhirat sekaligus.

Islam menganggap bahwa masalah adalah salah satu alasan atau landasan bagi suatu kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi, selama *masalah* tersebut hakiki dan tidak bertentangan dengan *masalah* yang lebih besar. Dalam kerangka ini *maqashid* membagi tiga tingkatan, yaitu:

2.1.5.1 Dharuriyat

Al-Dharuriyat, menurut ulama ushul fiqh, adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik secara agama maupun dirinya sendiri. Jika hal ini tidak ada atau tidak terpelihara dengan baik, maka kehidupan manusia di dunia dan akhirat akan rusak. Dengan kata lain, *al-dharuriyat* adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi menjaga kemaslahatan mereka. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-dharuriyat* ini mengharuskan pemeliharaan lima kebutuhan yang sangat esensial, yaitu:

1. Memelihara Kemaslahatan Agama

Agama merupakan aspek yang mesti dimiliki oleh setiap manusia untuk meningkatkan kedudukannya di atas makhluk lainnya. Agama Islam dianggap sebagai nikmat Allah yang sangat mulia dan sempurna. Oleh karena itu, agama harus dijaga dari segala sesuatu yang dapat menggangukannya, baik dari dalam maupun dari luar. Secara eksternal, agama harus dipelihara dari segala ancaman yang ingin menghancurkannya. Dalam konteks ini, umat Islam diperbolehkan melakukan jihad untuk membela agama dari ancaman luar, dan dalam jihad (perang), pengorbanan nyawa pun hal yang wajib dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan kebutuhan pokok yang paling tinggi bagi manusia.

2. Memelihara Jiwa

Untuk mencapai tujuan memelihara kemaslahatan agama, ajaran Islam melarang keras melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan lain yang dapat mengancam eksistensi jiwa manusia. Jika larangan ini dilanggar, Islam memberikan sanksi yang berat, seperti qishas (hukuman yang setara) dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman serius bagi mereka yang mencoba membunuh diri. Semua ini diatur dalam rangka memelihara eksistensi jiwa manusia selama hidup di dunia.

3. Memelihara Akal

Akal adalah fitrah yang membedakan manusia dengan binatang. Manusia hidup, berpikir, dan mencari solusi dari permasalahan dengan menggunakan akalnya, serta menjalankan berbagai fungsi kognitif lainnya. Oleh karena itu, Allah mengharamkan minum khamar dan menghukum pelakunya dengan hukuman had, serta melarang untuk menghayal, karena tindakan ini bertentangan dengan penggunaan akal yang sehat dan jelas.

4. Memelihara Keturunan

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan, di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh karena itu, diaturlah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat memiliki anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Allah mengisyaratkan pentingnya perkawinan dan melarang perbuatan zina sebagai alternatif. Garis keturunan yang jelas ini tidak hanya penting untuk kehidupan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan akhirat nanti.

5. Memelihara Harta

Harta merupakan sesuatu yang mendukung kehidupan manusia di dunia dan juga dapat berkontribusi pada kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, Islam mengakui hak milik pribadi, karena kepemilikan ini dapat memberikan

kebahagiaan kepada seseorang selama hidup di dunia. Karena itu, harta diakui sebagai penopang kehidupan yang sangat penting, dan Allah memperbolehkan manusia untuk memiliki harta serta memerintahkan mereka untuk mencarinya dengan cara yang halal, sementara juga melarang pengambilan harta orang lain secara tidak sah.

2.1.5.2 Hajiyat

Hajiyat merujuk pada kebutuhan manusia untuk memfasilitasi kehidupan, mengurangi kesulitan, dan menghilangkan beban dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa kajian fiqh-ushul fiqh, penjelasan tentang *hajiyat* cenderung bersifat ritualistik dan berpusat pada aspek vertikal. Namun, penting untuk menginterpretasikan konsep ini dengan mempertimbangkan konteks sosial dan masyarakat yang lebih luas. Beban ekonomi, sosial, politik, dan lainnya yang nyata dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan keringanan dan kemudahan yang berasal dari ajaran agama. Dengan demikian, prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* tetap relevan dan tidak pernah kehilangan konteks dalam kehidupan nyata masyarakat.

Hal-hal yang diperintahkan syara' melakukannya secara baik, seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal.

1. Melaksanakan apa yang diperintahkan syariah dengan baik, seperti mendirikan sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas akal manusia melalui pendidikan.

2. Mencegah segala hal yang dilarang oleh syariah yang memiliki urgensi, seperti perbuatan zina dan segala tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan pada garis keturunan.
3. Memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia, termasuk segala bentuk kemudahan yang dapat memberikan kelapangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

2.1.5.3 Tahsiniyat

Tahsiniyat merujuk pada semua kebutuhan dan upaya yang dilakukan manusia untuk menjadikan kehidupan lebih nyaman, lebih mudah, dan lebih lapang. Kebutuhan pada tingkat ini tidak menghalangi pemenuhan kebutuhan lima pokok, tetapi lebih berfokus pada kebutuhan pelengkap. Contohnya, menggunakan wewangian, menikah dengan orang yang memiliki keturunan terhormat, menghindari pernikahan dengan kerabat dekat, dan lain sebagainya. Dalam konteks penetapan hukum, kebutuhan pada tingkat ini biasanya berkaitan dengan hukum sunat untuk perbuatan yang dianjurkan, dan hukum makruh untuk perbuatan yang tidak dilarang secara kategoris tetapi tidak dianjurkan.

2.1.6 Indikator Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam menjelaskan bahwa kesejahteraan dapat dicapai dengan memastikan pemenuhan semua kebutuhan dasar manusia, mengurangi segala bentuk kesulitan dan ketidaknyamanan, serta mampu meningkatkan kualitas baik secara moral maupun material dalam kehidupan. Tujuannya untuk mencapai kesejahteraan

yang menyeluruh bagi manusia, yang secara universal mencakup aspek material, spiritual, dan moral.

Dalam ekonomi Islam, indikator kesejahteraan masyarakat (*falah*) mengacu pada tujuan syariat Islam yaitu terjaganya 5 prinsip dalam *maqashid syari'ah* (Sodiq, 2015) diantaranya:

1. Memelihara Agama (*hifz ad-din*)

Memelihara agama (*hifz ad-din*) dengan maksud menjaga keberagaman, setiap individu memiliki hak atas kebebasan untuk menentukan keyakinan dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan mereka. Dalam Islam, tujuan hidup utama adalah beribadah kepada Allah, yang merupakan prioritas tertinggi dalam kehidupan manusia.

2. Memelihara Jiwa (*hifz an-nafs*)

Memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) dapat diartikan bahwa pemeliharaan kesejahteraan mencakup penghapusan segala hal yang dapat mengancam kehidupan seseorang. Ini dapat dinilai dari berbagai faktor, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, air bersih, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya. Jika kebutuhan-kebutuhan ini diabaikan, dapat mengancam eksistensi atau kelangsungan hidup seseorang.

3. Memelihara Akal (*hifz al-'aql*)

Memelihara akal (*hifz al - 'aql*) yaitu memperhatikan segala hal yang dapat mengancam integritas dan fungsi akal atau pikiran seseorang. Pemeliharaan akal dapat dilakukan

dengan berbagai cara, seperti menghindari minuman beralkohol, karena penyalahgunaannya dapat mengganggu fungsi akal. Selain itu, untuk menjaga akal tetap sehat, disarankan untuk terus mencari ilmu dan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan,

4. Memelihara Keturunan (*hifz an-nasl*)

Memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) berarti melindungi dan mempertahankan kelangsungan keturunan dari segala hal yang mengancamnya. Islam memberikan perlindungan terhadap keturunan dengan mewajibkan pernikahan dan mengharamkan perzinaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar keturunan memiliki nasab atau silsilah yang jelas. Tujuan utama dari perlindungan terhadap keturunan adalah untuk melindungi mereka dari hal-hal yang dapat merugikan keturunan atau keluarga secara keseluruhan.

5. Memelihara Harta (*hifz al-mal*)

Memelihara harta (*hifz al-mal*) yaitu terjanganya eksistensi atau keberadaan harta melalui perlindungan, pengaturan kepemilikan, dan larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah. Harta merupakan salah satu elemen penting bagi manusia untuk mempertahankan hidupnya, dan manusia tidak dapat menghindari penggunaan harta dalam kehidupannya. Manusia bekerja keras untuk mencari harta guna menjaga kelangsungan hidupnya, sekaligus sebagai wujud dari ketaqwaannya kepada Allah SWT. Oleh karena

itu, perlindungan terhadap harta sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan syariat Islam.

Dalam penelitian ini, indikator akan dikombinasikan antara indikator teoritis dan indikator tinjauan perspektif ekonomi syariah. Berikut indikator menurut Kolle (1974) yang dikaitkan dengan perspektif syariah yaitu sebagai berikut:

1. kualitas hidup dari segi materi meliputi keadaan tempat tinggal dan pemenuhan gizi pada pangan. Indikator tersebut berhubungan dengan salah satu prinsip kesejahteraan dalam Islam yaitu memelihara jiwa, yang apabila tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut dapat mengancam kehidupan atau jiwa seseorang.
2. Kualitas hidup dari segi fisik meliputi kesehatan dan keadaan lingkungan sekitar. Indikator tersebut berhubungan dengan salah satu prinsip kesejahteraan dalam Islam yaitu memelihara jiwa, yang mana fasilitas kesehatan dapat membantu terciptanya masyarakat yang Sejahtera.
3. Kualitas hidup dari segi mental, meliputi fasilitas pendidikan. Indikator tersebut berhubungan dengan salah satu prinsip kesejahteraan dalam Islam yaitu memelihara akal, dengan adanya pendidikan akan terciptanya mental dan pribadi yang baik.
4. Kualitas hidup dari segi spiritual meliputi moral, etika dan keserasian penyesuaian. Indikator tersebut berhubungan dengan salah satu prinsip kesejahteraan dalam Islam yaitu

memelihara agama dan harta, adanya Upaya meningkatkan moral dengan menambah ketaqwaan dan larangan mengambil hak orang lain.

2.2 Pengelolaan Dana Desa

2.2.1 Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut buku pintar DD yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan DD sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Dapat disimpulkan bahwa DD adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan khusus untuk desa. Dana ini ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan di tingkat desa, seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, DD bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat di tingkat desa melalui penggunaan dana dari APBN yang dikelola melalui APBD Kota/Kabupaten.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 juga memberikan definisi serupa tentang DD. Menurut peraturan tersebut, DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan khusus untuk Desa. Dana ini kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. DD digunakan untuk berbagai keperluan di tingkat Desa, seperti biaya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dasar minimal DD yang diterima oleh setiap Desa secara merata dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran DD yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 juga menggariskan tujuan dan penggunaan DD dalam rangka mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa itu sendiri. DD, yang merupakan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai kewenangan Desa. Mengatur DD

melibatkan serangkaian aktivitas, termasuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi penggunaan dana tersebut. Desa bertanggung jawab penuh atas pengelolaan DD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam mengatur DD, prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk diterapkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menegaskan pentingnya prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaan DD. Pengaturan DD harus dilakukan dengan terbuka, bertanggung jawab, melibatkan partisipasi masyarakat, dan dilaksanakan secara teratur serta patuh terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa melibatkan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terkait dengan anggaran desa. Dalam pengelolaan DD, pentingnya pengawasan dari berbagai pihak terkait tidak bisa diabaikan. Pengawasan ini merupakan bentuk pemeriksaan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan yang

telah ditetapkan. Tujuannya adalah agar DD dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan (Ladiku et al., 2021).

Menurut (Ayumiati et al., 2019) DD merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun anggaran ini dikelola oleh pemerintah desa yaitu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Menurut A. Saibanai dalam (Amsyal et al., 2021) DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota. Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan di tingkat Desa, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, menurut Lili (2018), DD adalah alokasi dana yang diterima oleh desa setiap tahun dari APBN. Dana tersebut disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau pembangunan di tingkat desa serta untuk memberdayakan masyarakat pedesaan secara

keseluruhan. Dengan demikian, kedua definisi tersebut menggambarkan bahwa DD merupakan sumber dana yang penting bagi desa untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui jika pengelolaan DD adalah kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari APBN yang akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.

2.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Desa, keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menghasilkan pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan desa yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa semua aspek keuangan desa diatur dengan benar, mendukung pembangunan yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Pemendagri RI Nomor 113 Tahun 2014).

2.2.2.1 Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah dalam perencanaan pembangunan desa.

Menurut Pemandagri RI Nomor 113 Tahun 2014, terdapat beberapa indikator perencanaan pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati Bersama.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

2.2.2.2 Pelaksanaan

Dalam mengelola keuangan desa, terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti terkait dengan penerimaan serta pengeluaran keuangannya. Salah satunya adalah semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dilakukan melalui Rekening Kas Desa. Setiap permohonan pendanaan untuk kegiatan harus disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pelaksana kegiatan bertanggung

jawab atas pengeluaran yang terjadi, yang akan memengaruhi anggaran belanja kegiatan.

Menurut Pemandagri RI Nomor 113 Tahun 2014, terdapat beberapa indikator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
3. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

2.2.2.3 Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah tugas penting yang ditangani oleh Bendahara desa. Bendahara desa bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran. Mereka melakukan pencatatan dengan cara yang teratur dan berurutan sesuai dengan waktu transaksi tersebut terjadi. Selain itu, Bendahara desa juga bertanggung jawab atas uang tersebut melalui laporan pertanggungjawaban yang mereka sampaikan setiap bulan kepada kepala desa.

Indikator penatausahaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Pemendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Menurut Pemendagri RI Nomor 113 Tahun 2014, terdapat beberapa indikator penatausahaan pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut:

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2.2.2.4 Pelaporan

Dalam menjalankan tugasnya serta mengemban wewenang, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan secara berkala. Laporan tersebut berbentuk periodik, yaitu berupa laporan semesteran serta tahunan yang harus diserahkan kepada Bupati/Walikota.

Menurut Pemendagri RI Nomor 113 Tahun 2014, terdapat beberapa indikator pelaporan pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa; laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
4. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

2.2.2.5 Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan desa. Selain itu, laporan pertanggungjawaban ini juga harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Menurut pemendagri RI Nomor 113 Tahun 2014, terdapat beberapa indikator pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

2.2.3 Indikator Pengelolaan Dana Desa

Indikator pengelolaan DD menurut (Harjono, dkk, 2014) yaitu:

1. Pengalokasian sumber daya. Pengelolaan DD harus dilaksanakan dengan menyeluruh tanpa ada fokus kepada pihak-pihak yang spesifik.
2. Operasional kegiatan mendukung efisiensi dan efektifitas. Pengelolaan DD dilakukan secara efektif dan efisien, semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Indikator pengelolaan DD menurut (Astuti & Yulianto, 2016) terdapat beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi, adalah prinsip adanya keterbukaan dimana semua kegiatan pemerintahan dikelola secara terbuka sehingga masyarakat memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa yang jujur dan benar.

2. Akuntabilitas, adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

3. Partisipasi, adalah setiap masyarakat mempunyai suara dalam menentukan kebijakan publik yang menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan DD harus memperhatikan indikator-indikator yang telah ditetapkan diantaranya:

1. Prioritas penggunaan anggaran DD.
2. Melaksanakan Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
3. Melakukan Publikasi pada Pengelolaan Anggaran.
4. Membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Dari ketiga indikator diatas, penulis memilih menggunakan indikator menurut (Astuti & Yulianto, 2016), karena ketiga poin indikator tersebut menjelaskan dengan mudah dan mampu memahami aspek yang diterapkan dalam pengelolaan DD. Berikut indikator menurut (Astuti & Yulianto, 2016) yang dikaitkan dengan perspektif syariah:

1. **Transparansi**, di mana semua kegiatan pemerintahan dikelola secara terbuka, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa yang jujur dan benar. Transparansi adalah konsep penting dalam ekonomi Islam, yang berarti memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada semua pihak yang terlibat.
2. **Akuntabilitas**, kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam Islam diturunkan dari konsep tauhid dan kepemilikan. Berdasarkan dua konsep tersebut, diturunkan cara pandang terhadap pelaksanaan tanggung jawab dan mengarahkan seseorang tidak melakukan kecurangan maupun korupsi.
3. **Partisipasi**, peran aktif setiap anggota masyarakat dalam penentuan kebijakan publik yang menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa.

2.2.4 Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Islam mengajarkan tentang studi perencanaan secara jelas dan terperinci dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman untuk menindaklanjuti berbagai

macam permasalahan hidup. Al-Qur'an dan As-Sunnah memberikan panduan komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk perencanaan dan manajemen sumber daya, yang sangat relevan dalam konteks pengelolaan keuangan desa dan pembangunan masyarakat .

Transparansi anggaran merupakan salah satu bentuk tabligh. Tabligh, atau menyampaikan segala sesuatu tanpa ada yang disembunyikan, mencerminkan kejujuran dalam berbicara, niat, kemauan, perencanaan, pelaksanaan rencana, tindakan, dan dalam merealisasikan semua ketentuan agama. Dalam pengelolaan anggaran, kejujuran ini hanya bisa dijalankan melalui transparansi anggaran. Oleh karena itu, menerapkan transparansi anggaran adalah sebuah kewajiban. Ini berarti bahwa menurut hukum Islam, menghindari transparansi anggaran adalah sebuah kemaksiatan yang bisa menghapus semua pahala ibadah kepada Tuhan. Dengan demikian, transparansi menjadi instrumen penting yang dapat melindungi uang rakyat dari korupsi. Dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan (Nurhayati & Saleh Ridwan, 2019). Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 101:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَنْزِلُ فَأَلُوفًا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan apabila Kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau (Muhammad) hanya mengada-ada

saja." Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui." (QS. An-Nahl 16: Ayat 101).

Menurut tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish Shihab ayat diatas menjelaskan tentang siapa yang diperdaya setan dan tentang kemantapan rayuannya terhadap kaum musyrikin, sekaligus uraian Al-Qur'an yang kesemuanya menjadi pokok uraian dan mengandung tanggapan kaum musyrikin terhadap Al-Qur'an. Allah juga menuntun melalui Al-Qur'an dan sunnah akibat perkembangan masyarakat dan demi kemaslahatannya. Ayat ini juga menguraikan menyangkut kapan dan apa yang diganti dan menggantikan serta apa yang merupakan kemaslahatan Masyarakat.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan bentuk pengelolaan DD di desa benteng paremba dimana Akuntabilitas dalam perspektif hukum islam yang menggambarkan suatu pertanggung jawaban yang mutlak. Sebagai salah satu contoh sifat nabi yakni amanah dalam menjalankan tugas atau wewenang. Mengenai bentuk akuntabilitas tersebut dapat dilihat dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 72:

أَنَا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَ

شَفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia.

Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh," (QS. Al-Ahzab 33: Ayat 72).

Menurut tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish Shihab ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah memberi amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, namun semuanya enggan untuk memikul amanat tersebut dan khawatir suatu waktu akan mengkhianatnya. Lalu manusia diberi tugas untuk memikul suatu amanat tersebut selama hidup di dunia. Manusia bisa saja berbuat zalim atau bisa memungkinkan untuk mengkhianati amanat yang telah diberikan tanpa menyadari bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar apa yang manusia ucapkan.

Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hal ini, hak pemerintah desa adalah sebagai ulil amri, di mana warga masyarakat memiliki kewajiban untuk menaati ulil amri agar pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangan di segala bidang dalam lingkup pemerintahan desa dapat terealisasi (Sopriyanto et al., 2020). Ekonomi Islam tidak hanya mencakup etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif, karena mengkaji aktivitas nyata manusia dan masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Ini berarti bahwa ekonomi Islam berusaha untuk memahami dan mengatasi masalah ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan, dengan menggunakan

prinsip-prinsip yang diambil dari ajaran Islam. Pengelolaan DD dikatakan telah berjalan efektif karena dapat dilihat dari bukti nyata di lapangan, seperti pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan di bidang umum dan keagamaan (Permata & Fauzan, 2023).

2.2.5 Indikator Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam penelitian ini, indikator akan dikombinasikan antara indikator teoritis dan indikator tinjauan perspektif ekonomi syariah. Berikut indikator menurut (Astuti & Yulianto, 2016) yang dikaitkan dengan perspektif syariah yaitu sebagai berikut:

1. **Transparansi**, keterbukaan di mana seluruh kegiatan pemerintahan dikelola secara terbuka, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa yang jujur dan benar. Transparansi adalah konsep penting dalam ekonomi Islam, yang berarti memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada semua pihak yang terlibat.
2. **Akuntabilitas**, kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam Islam diturunkan dari konsep tauhid dan kepemilikan. Berdasarkan dua konsep tersebut, diturunkan cara pandang terhadap pelaksanaan tanggung jawab dan

mengarahkan seseorang tidak melakukan kecurangan maupun korupsi.

3. Partisipasi, peran aktif setiap anggota masyarakat dalam penentuan kebijakan publik, yang menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa.

2.3 Pembangunan Infrastruktur

2.3.1 Pengertian Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan merupakan faktor penting bagi kelangsungan sebuah negara. Pembangunan membawa berbagai manfaat di sektor ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lainnya. Salah satu modal utama dalam memastikan kelangsungan pembangunan adalah penduduk. Jumlah dan kualitas penduduk sangat menentukan keberhasilan pembangunan di suatu negara (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023).

Infrastruktur, menurut Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. (Keusuma, 2015), dalam (Khairunnisa et al., 2017) menyatakan bahwa infrastruktur adalah pondasi atau rancangan kerja yang mendasari pelayanan pokok, fasilitas, dan institusi yang menjadi dasar bagi pertumbuhan dan pembangunan suatu area, komunitas, dan sistem. Dalam kaitannya dengan pembangunan

ekonomi, beberapa ekonom juga memberikan pendapat mengenai infrastruktur. Hirschman mendefinisikan infrastruktur sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan. Tanpa infrastruktur, kegiatan produksi di berbagai sektor ekonomi (industri) tidak dapat berfungsi.

Menurut Fitriyah dalam (Khairunnisa et al., 2017) pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam mencapai sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembangunan infrastruktur adalah sebuah dinamika dalam organisasi publik yang harus dilakukan untuk mendukung pengembangan wilayah. Pembangunan infrastruktur juga menjadi faktor penting untuk mendukung kelancaran kegiatan sosial-ekonomi di suatu daerah, karena tanpa infrastruktur yang memadai, kegiatan perekonomian akan terhambat dan dapat menghambat proses pembangunan.

Menurut (Rakhmat, 2013), pembangunan infrastruktur menjadi fondasi penting di berbagai negara berkembang karena mendorong kemajuan ekonomi melalui upaya pertumbuhan ekonomi. Namun, pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi tidak selalu menghasilkan distribusi yang merata, yang kemudian menyebabkan kesenjangan ekonomi, sosial, dan politik semakin melebar. Pemikiran strukturalis klasik menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dan memperbaiki struktur ekonomi secara

instrumental. Dalam pendekatan ini, perbaikan struktur kekuasaan dan sosial tidak dilakukan secara radikal.

2.3.2 Fungsi dan Tujuan Pembangunan Infrastruktur

Fungsi infrastruktur dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa tujuan penyediaan infrastruktur adalah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam menghadapi persaingan global.

Berdasarkan pengertian diatas maka fungsi utama infrastruktur yaitu:

1. Memudahkan proses pelaksanaan pekerjaan sehingga bisa menghemat banyak waktu.
2. Dapat meningkatkan produktifitas baik jasa dan barang, serta hasil kerja lebih terjamin dan berkualitas.
3. Lebih sederhana/memudahkan para pelaku/pengguna.
4. Susunan ketepatan stabilitas para pekerja lebih terjamin, dan menimbulkan rasa nyaman bagi setiap orang-orang yang berkepentingan.
5. Membangkitkan rasa puas bagi orang-orang yang berkepentingan yang menggunakannya.

Tujuan pembangunan infrastruktur yaitu (RKP Presiden RI, 2010):

1. Peningkatan kapasitas, kuantitas dan kualitas berbagai penunjang infrastruktur pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

2. Pembangunan percepatan irigasi untuk rangka mendukung ketahanan pembangunan nasional.
3. Percepatan penyediaan air baku di suatu wilayah atau daerah.
4. Keterhubungan antar wilayah menjadi meningkat dalam mendukung dari berbagai serktor perkembangan ekonomi.
5. Ketahanan energi menjadi meningkat.

2.3.3 Indikator Pembangunan Infrastruktur

Menurut (BAPPEDA, 2017) indikator pembangunan dapat diukur dari beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan perkapita, ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
2. Struktur ekonomi, dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manupaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus.
3. Urbanisasi.
4. Angka Tabungan.
5. Indeks Kualitas Hidup (IHK).
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurut Adisasmita dalam (Mlik, 2022) sedikitnya ada lima prinsip yang harus diterapkan dalam pembangunan desa yaitu:

1. Transparansi; yaitu adanya keterbukaan dalam proses pembangunan.

2. Partisipatif; sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dengan mengikut sertakan masyarakat.
3. Dapat dinikmati masyarakat; dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan harus mampu menyelesaikan masalah publik. Sehingga, harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat.
4. Akuntabilitas; adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.
5. Sustainable (berkelanjutan); adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, dengan amat memperhatikan pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Menurut (Rifyal & Annisa, 2020) indikator keberhasilan pembangunan suatu negara dapat dilihat pada ketercapaian target-target ekonomi, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi.
2. Pendapatan perkapita.
3. Jumlah pengangguran.
4. Tingkat kemiskinan.
5. Neraca pembayaran

Dari ketiga indikator diatas, penulis memilih menggunakan indikator menurut Adisasmita dalam (Mlik, 2022), karena ketiga poin indikator tersebut menjelaskan dengan mudah dan mampu memahami aspek yang harus diterapkan dalam pembangunan infrastruktur. Berikut indikator menurut Adisasmita dalam (Mlik, 2022) yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi; yaitu adanya keterbukaan dalam proses pembangunan.
2. Partisipatif; sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dengan mengikut sertakan masyarakat.
3. Dapat dinikmati masyarakat; dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan harus mampu menyelesaikan masalah publik. Sehingga, harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat.
4. Akuntabilitas; adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.
5. Sustainable (berkelanjutan); adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, dengan amat memperhatikan pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

2.3.4 Pembangunan Infrastruktur dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam perspektif Islam, pembangunan memiliki karakteristik dan orientasi yang berbeda dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Islam menekankan bahwa selain pembangunan material, aspek spiritual dan moral juga sangat penting. Pembangunan dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek duniawi, tetapi juga pada kesejahteraan di akhirat (Rifyal & Annisa, 2020). Fokus utama pembangunan adalah manusia beserta lingkungan budayanya, yang berbeda dari konsep pembangunan ekonomi konvensional yang hanya berfokus pada lingkungan fisik. Dengan demikian, Islam memperluas cakupan pembangunan dari hanya lingkungan fisik ke aspek manusia. Pembangunan adalah aktivitas multidimensional sehingga semua usaha harus mempertimbangkan keseimbangan berbagai faktor dan menghindari ketimpangan.

Dalam pandangan ekonomi Islam, pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara harus memiliki tujuan jangka panjang, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada aspek duniawi saja, tetapi juga harus dikaitkan dengan tujuan yang lebih abadi (transendental). Oleh karena itu, pembangunan harus didasarkan pada ketentuan syari'ah, termasuk firman Tuhan, sabda Rasul, ijma, qiyas, serta ijtihad para ulama fiqh (Purwana, 2013).

Secara umum, tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam adalah untuk memenuhi dan menjaga maqâshid syarīah (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sehingga tercapai falâh atau kesejahteraan di dunia dan akhirat. Falâh mencakup kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan harga diri, dengan berbagai aspek yang dipenuhi baik dalam skala kecil maupun besar. Sesuai dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: *"Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahi lah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."* (QS. Al-Mulk 67: Ayat 15).

Menurut tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish Shihab ayat diatas menjelaskan tentang kekuasaan Allah sekaligus kelemahlembutan-Nya dalam pengaturan makhluk termasuk manusia, agar mereka mensyukuri nikmat-Nya. Allah-lah yang menjadikan bumi ini nyaman untuk hidup dan dihuni, sehingga mudah sekali untuk melakukan aktivitas, baik berjalan, bertani, berniaga, dan silahkan kapan kamu mau, berjalanlah di penjuru-penjurnya bahkan pegunungan-pegununganannya dan makanlah Sebagian dari rezeki-Nya melimpah melebihi kebutuhan kamu dan mengabdilah kepada-Nya sebagai tanda Syukur atas limpahan rezeki-Nya, dan hanya

kepada-Nya kamu masing-masing dibangkitkan untuk mempertanggung jawabkan amalam-amalanmu. Ayat ini merupakan ajakan bahkan dorongan kepada umat manusia secara umum dan kaum muslimin khususnya agar memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menggunakannya untuk kenyamanan hidup mereka tanpa melupakan generasi sesudahnya. Dapat disimpulkan bahwa Allah telah memberikan kemudahan bagi manusia untuk mencari rezeki dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Allah telah melapangkan bumi ini dan menyediakan berbagai macam fasilitas yang bisa dimanfaatkan manusia untuk mencari rezeki.

Menurut (Joni Tamkin Borhan, 2008) dalam (Rifyal & Annisa, 2020) mengungkapkan tentang tujuan kebijakan pembangunan dalam kerangka Islam adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia, di mana manusia dijadikan fokus utama dalam kebijakan pembangunan Islam. Prioritas utama diberikan pada pengembangan pendidikan, orientasi spiritual, dan pembentukan struktur hubungan yang berdasarkan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi.
2. Peningkatan produksi yang bermanfaat, dengan penekanan pada pengeluaran untuk kebutuhan dasar (*dharuriyat*) dibandingkan dengan pengeluaran untuk barang pelengkap (*hajiyyat*) dan barang mewah (*tahsiniyat*).
3. Peningkatan kualitas hidup, melalui penciptaan lapangan kerja, penyediaan sistem jaminan sosial, dan distribusi pendapatan yang merata.

4. Pembangunan yang seimbang, yaitu pembangunan yang harmonis dan tidak menyebabkan ketimpangan di berbagai sektor dan wilayah.
5. Pembangunan teknologi baru.
6. Pengurangan ketergantungan terhadap utang luar negeri.

Pembangunan dalam Islam adalah pembangunan yang berfokus pada manusia itu sendiri. Pembangunan ini berasal dari kesadaran tinggi umat yang saling bekerja sama, bukan dari kelompok kecil tertentu (Murni et al., 2020). Dalam Islam, tidak ada keraguan mengenai aspek pembangunan. Ketika sebuah negara memiliki infrastruktur yang baik, hal ini secara tidak langsung akan mendukung pemeliharaan dan perbaikan maqāsyid syarī'ah (kemaslahatan manusia). Sebaliknya, infrastruktur yang buruk akan berdampak negatif pada maqāsyid syarī'ah, dan harapan kebahagiaan di akhirat tidak akan tercapai karena tidak bertemu dengan Tuhan. Oleh karena itu, konsep pembangunan dalam Islam sebenarnya sederhana, karena tidak menekankan pada kepemilikan individu dan menolak kepemilikan kolektif, dengan motivasi utamanya adalah "spiritual" karena Allah.

2.3.5 Indikator Pembangunan Infrastruktur dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil indikator menurut Adisasmita dalam (Mlik, 2022) dalam pembangunan desa yang dikombinasikan dengan perspektif ekonomi syariah yaitu:

1. Transparansi, adanya keterbukaan dalam proses pembangunan dalam upaya memajukan bidang sosial dan ekonomi dengan menghormati dan melindungi hak masyarakat, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
2. Partisipatif, perencanaan dengan mengikut sertakan masyarakat dalam musyawarah.
3. Dapat dinikmati masyarakat dan dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat.
4. Akuntabilitas, pelaksanaan yang tanggung jawab dan mengarahkan seseorang tidak melakukan kecurangan maupun korupsi.
5. Sustainable (berkelanjutan) dan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

2.4 Penelitian Terkait

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai referensi pendukung ketika penulis melakukan penelitian. Dari penelitian sebelumnya peneliti tidak menemukan judul yang sama seperti judul penelitian ini. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi bahan bagi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berikut beberapa penelitian sebelumnya berupa jurnal terkait penelitian yang dilakukan peneliti.

(Asrul, 2023), dalam penelitiannya mengenai Pengaruh Pengelolaan DD dan Transparansi DD terhadap Kesejahteraan (Studi Di Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam

Kabupaten Padang Pariaman) dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DD dan sistem transparansi DD memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan bahwa dengan adanya pengelolaan dana desa yang baik serta didasari dengan transparansi yang baik dapat menciptakan suatu tingkat kesejahteraan masyarakat baik.

(Fajri, 2017), dalam penelitiannya mengenai Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasis di Desa Jenggala Kecamatan Tanjunga Kabupaten Lombok Utara) dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: pertama, infrastruktur jalan desa yang telah dibangun tahap demi tahap memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada khususnya masyarakat diwilayah Desa Jenggala. Kedua, aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat yaitu jumlah keluarga sejahtera dan jenis pekerjaan serta tingkat pendidikan juga mempengaruhi laju peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

(Ladiku et al., 2021), dalam penelitiannya mengenai Pengaruh Pengelolaan DD terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara dengan menggunakan metode kuantitatif. Populasi yakni aparat desa dan masyarakat kemudian dengan sampel sebanyak 75 orang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan DD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan

masyarakat di Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. Nilai Koefisien regresi dengan arah positif menunjukkan bahwa pengelolaan DD yang baik akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. Besarnya koefisien determinasi atau angka R Square adalah sebesar 0,518. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 51,80% variabilitas kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara dapat dijelaskan oleh pengelolaan DD, sedangkan sisanya sebesar 48,20% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

(Nurohman et al., 2019), dalam penelitiannya mengenai DD dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Wisata Menggoro. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan dengan 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara kebijakan desa dengan kesejahteraan masyarakat.

(Nasution & Lindawati, 2022), dalam penelitiannya mengenai Pengaruh DD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan diperoleh nilai DD berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan nilai koefisien 1.036. Dengan kata lain, DD yang semakin meningkat, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diketahui nilai Sig. =

$0,000 < 0,05$, maka disimpulkan bahwa DD berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

(Safarullah et al., 2021), dalam penelitiannya mengenai Analisis Perencanaan Pelaksanaan DD dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus DD di Desa Sengon Kecamatan Tanjung, Brebes dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan belum berjalan secara partisipatif, belum melibatkan masyarakat kalangan bawah.

(Mattoasi et al., 2021), dalam penelitiannya mengenai Keseimbangan Model Pengelolaan DD untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Kabupaten Bonebolango dengan menggunakan metode campuran (Mix-Methode) dengan menyatukan data kuantitatif dan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penglibatan masyarakat dalam menciptakan keseimbangan merupakan hal fundamental untuk mewujudkan masyarakat Sejahtera. Disisi lain, permasalahan pengelolaan DD yaitu penggunaan yang belum maksimal untuk menentaskan kemiskinan, belum tepat sasaran atau belum sesuai dengan potensi desa, fokus pembangunan masih berorientasi pada infrastruktur masih ditemukan di lapangan.

(Emylia & Mildawati, 2019), dalam penelitiannya mengenai Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif,

berdasarkan karakt, eristik masalahnya penelitian ini menggunakan metode penelitian kasual komparatif (Casual-Comparative Research). Sampel pada penelitian sebanyak 97orang dari masyarakat desa Cunggu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi DD, kebijakan desa, kelembagaan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

(Goan & Luju, 2023), dalam penelitiannya mengenai Pengaruh Pengelolaan DD terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Meken Detung Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka dengan menggunakan metode deskriptif kuantitastif bersifat asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Meken Detung dengan jumlah sampel 84 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pengelolaan DD pada Desa Meken Detung Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka, bahwa varabel independen berpengaruh positif dan sigfifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Meken Detung Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka.

(Rahayu, 2017), dalam penelitiannya mengenai Strategi Pengelolaan DD untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang dengan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. sampel adalah Purposive Sampling dengan 1 responden dari pegawai bapermades, dan 11 responden perangkat Desa Kalikayen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika mekanisme pengelolaan DD

pada Desa Kalikayen sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan, perkembangan infrastruktru desa juga sudah jauh lebih baik, serta menggunakan strategi yang tepat dalam pengelolaan DD yaitu dengan mengefektifkan dana-dana bantuan untuk meningkatkan perekonomian dan memanfaatkan sumber daya manusia yang potensial.

Adapun hasil deskripsi penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

| No. | Peneliti/Judul | Metode Penelitian | Hasil | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|--|--|---|--|
| 1. | Asrul (2023), Pengaruh Pengelolaan Dana Desa dan Transparansi Dana Desa terhadap Kesejahteraan (Studi Di Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman). | Kuantitatif. Sampel: 90 orang masyarakat Pasilihan. Variabel Dependen: Kesejahteraan Masyarakat. Variabel Independen: Pengelolaan Dana - Desa, Transparansi Dana Desa. Metode Analisis: Regresi Linear Berganda. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana dan sistem transparansi Dana Desa memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan bahwa dengan adanya pengelolaan dana desa yang baik serta didasari dengan transparansi yang baik dapat menciptakan suatu tingkat kesejahteraan | Persamaan pada penelitian yaitu variabel yang digunakan menggunakan variabel pengelolaan dana desa dan variabel kesejahteraan masyarakat. | Perbedaan pada penelitian yaitu lokasi yang menjadi tujuan penelitian ini berbeda. |

Tabel 2.1-Lanjutan

| No . | Peneliti/Judul | Metode Penelitian | Hasil | Persamaan | Perbedaan |
|------|--|---|---|---|--|
| | | | masyarakat baik. | | |
| 2. | Lalu Moh. Nazar Fajri (2017), Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara). | Kualitatif. Deskriptif. Variabel Dependen: Kesejahteraan Masyarakat Desa. Variabel Independen: Pembangunan Infrastruktur Jalan. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur jalan desa memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada khususnya masyarakat diwilayah Desa Jenggala dan aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat yaitu jumlah keluarga sejahtera dan jenis pekerjaan serta tingkat pendidikan juga mempengaruhi laju peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. | Persamaan pada penelitian yaitu variabel independen terkait dengan pembangunan infrastruktur. | Perbedaan pada penelitian yaitu lokasi yang menjadi tujuan penelitian ini berbeda. |
| 3. | Sarci Ladiku, Ismet Sulila, dan Yanti Aneta (2021), Pengaruh Pengelolaan Dana Desa | Kuantitatif. Sampel: 75 orang di Kecamatan Gentuma. Variabel | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa | Persamaan pada penelitian yaitu menggunakan variabel | Perbedaan pada penelitian yaitu lokasi yang menjadi |

Tabel 2.1-Lanjutan

| No. | Peneliti/Judul | Metode | Hasil | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|---|--|--|---|
| | terhadap Tingkat | Dependen: Kesejahteraan | berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat | | |
| | Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. | Masyarakat. Variabel Independen: Pengelolaan Dana Desa. Metode Analisis: Regresi Linear Sederhana. | di Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. | independent terkait dana desa. | tujuan penelitian ini berbeda. |
| 4. | Yulfan Arif Nurohman dan Rina Sari Qurniawati (2019), Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Wisata Menggoro. | Kuantitatif. Sampel: 100 orang masyarakat Desa Menggoro. Variabel Dependen: Kesejahteraan Masyarakat. Variabel Independen: Dana Desa. Metode Analisis: Regresi Linear Berganda. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara kebijakan desa dengan kesejahteraan masyarakat. | Persamaan pada penelitian yaitu menggunakan variabel dana desa dan kesejahteraan masyarakat. | Perbedaan pada penelitian yaitu lokasi yang menjadi tujuan penelitian ini berbeda dan metode penelitian yang berbeda. |
| 5. | Irianto Nasution, Badaruddin, dan Lindawati (2022), Pengaruh Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sidomulyo | Kuantitatif. Variabel Dependen: Desa Desa. Variabel Independen: Kesejahteraan Masyarakat. Metode Analisis: Regresi Linear | Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan diperoleh nilai Dana Desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan | Persamaan pada penelitian yaitu variabel dependen terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan menggunakan metode | Perbedaan pada penelitian yaitu lokasi yang menjadi tujuan penelitian ini berbeda |

Tabel 2.1-Lanjutan

| No. | Peneliti/Judul | Metode | Hasil | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|--|--|---|---|
| | Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang. | Berganda dan SWOT. | masyarakat, dengan nilai koefisien 1.036. Dengan kata lain, Dana Desa yang semakin meningkat, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diketahui nilai Sig. = $0,000 < 0,05$, maka disimpulkan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. | penelitian yang sama. | |
| 6. | Fajar Royan Safarullah, Ahmad Mulyadi Kosim, dan Retno Triwoelandari (2021), Analisis Perencanaan Pelaksanaa Dana Desa dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus Dana Desa di Desa | Kualitatif. Variabel: Dependen: Kesejahteraan Masyarakat. Variabel Independen: Perencanaan Pelaksanaan Dana Desa. Metode Analisis: Interaktif. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan belum berjalan secara partisipatif, belum melibatkan masyarakat kalangan bawah. | Persamaan pada penelitian yaitu variabel independen terkait dengan dana desa. | Perbedaan pada penelitian yaitu pada metode yang digunakan. |

Tabel 2.1-Lanjutan

| No. | Peneliti/Judul | Metode | Hasil | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|--|---|---|---|
| | Sengon Kecamatan Tanjung Brebes. | | | | |
| 7. | Mattoasi, Candra Cuga, Muhammad Sarlin, dan Sudirman (2021), Keseimbangan Model Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Kabupaten Bonebolango. | Metode Analisis: Metode campuran (Mix- Method) dengan menyatukan data kuantitatif dan data kualitatif. Variabel Dependen: Kesejahteraan Masyarakat. Variabel Independen: Pengelolaan Dana Desa. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa penglibatan masyarakat dalam menciptakan keseimbangan merupakan hal fundamental untuk mewujudkan masyarakat Sejahtera. Disisi lain, permasalahan pengelolaan Dana Desa yaitu penggunaan yang belum maksimal untuk menetaskan kemiskinan, belum tepat sasaran atau belum sesuai dengan potensi desa, fokus pembangunan masih berorientasi pada infrastruktur masih ditemukan di lapangan. | Persamaan pada penelitian yaitu variabel independen terkait dengan dana desa. | Perbedaan pada penelitian yaitu pada lokasi yang menjadi tujuan penelitian dan metode penelitian yang digunakan. |

Tabel 2.1-Lanjutan

| No | Peneliti/Judul | Metode | Hasil | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|---|---|--|
| 8. | Loura Emylia dan Titik Mildawati (2019), Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. | Kuantitatif. Sampel: 97 orang masyarakat Desa Canggung. Variabel Dependen: Kesejahteraan Masyarakat. Variabel Independen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa. Metode Analisis: Regresi Linear Berganda. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi Dana Desa, kebijakan desa, kelembagaan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. | Persamaan pada penelitian yaitu variabel dependen terkait kesejahteraan masyarakat dan menggunakan metode penelitian yang sama. | Perbedaan pada penelitian yaitu variabel independen yang digunakan berbeda, menggunakan variabel keuangan desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa, sedangkan untuk penelitian pada skripsi ini menggunakan variabel dana desa dan pembangunan infrastruktur. |
| 9. | Kristina Dua Goan, Antonius Philipus Kurniawan, dan Elisabet Luju (2023), Pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Peningkatan | Kuantitatif bersifat R A asosiatif. Sampel: 84 orang masyarakat Desa Meken Detung. | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pengelolaan Dana Desa Meken Detung Kecamatan | Persamaan pada penelitian yaitu variabel independen | Perbedaan pada penelitian yaitu lokasi yang menjadi |

Tabel 2.1-Lanjutan

| No . | Peneliti/Judul | Metode | Hasil | Persamaan | Perbedaan |
|------|---|--|--|--|--|
| | Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Meken Detung Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka. | Variabel Dependen: Kesejahteraan Masyarakat. Variabel Independen: Pengelolaan Dana Desa. Metode Analisis: Regresi Linear Sederhana. | Kangae Kabupaten Sikka, bahwa variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Meken Detung Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka. | terkait dana desa. | tujuan penelitian ini berbeda. |
| 10. | Depi Rahayu (2017), Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. | Kuantitatif. Sampel: 1 orang pegawai Bapermades dan 11 orang perangkat Desa Kalikayen. Variabel Dependen: Pengelolaan dana Desa. Variabel Independen: Kesejahteraan Masyarakat. Metode Analisis: | Hasil dari penelitian ini menunjukan mekanisme pengelolaan Dana Desa yang dilakukan desa Kalikayen sudah sesuai dengan aturan yang ada, perkembangan infrastruktur di desa sudah jauh lebih baik, dan Strategi | Persamaan pada penelitian yaitu menggunakan variabel Dana Desa dan kesejahteraan masyarakat. | Perbedaan pada penelitian yaitu lokasi yang menjadi tujuan penelitian ini berbeda. |

Tabel 2.1-Lanjutan

| | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|
| | | SWOT. | yang tepat untuk digunakan dalam pengelolaan Dana Desa yaitu dengan mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial. | | |
|--|--|-------|--|--|--|

Sumber: Data Diolah (2023)

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan bentuk strategi konseptual yang mengaitkan antara teori dengan berbagai faktor permasalahan yang dianggap penting untuk diselesaikan, sehingga dalam hal ini lebih mengacu pada tujuan penelitian tersebut. Berdasarkan definisi diatas maka dapat diartikan secara konseptual bahwasanya kerangka pemikiran adalah hasil dari pemikiran peneliti yang mengaitkan variabel-variabel dalam penelitian yang dimana hasil dari keterkaitan variabel tersebut merupakan tujuan dari penelitian (Sugiyono, 2019).

2.5.1 Pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Menurut A. Saibanai dalam Amsyal et al. (2021), DD merupakan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana ini diperuntukkan bagi desa-desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota. Penggunaan DD mencakup berbagai keperluan, seperti pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan proyek pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Dalam penelitian (Ladiku et al., 2021) yang meneliti dampak pengelolaan DD terhadap kesejahteraan masyarakat, menemukan hasil yang signifikan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa pengelolaan DD memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian (Safina & Sari, 2022) yang meneliti pengaruh pengelolaan dan penggunaan DD terhadap kesejahteraan masyarakat, menemukan hasil yang positif dan signifikan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa pengelolaan dan penggunaan DD memiliki pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lengkong & Tasik, 2018) bahwa pengelolaan DD memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Minahasa. Artinya, pengelolaan DD tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa. Pengelolaan DD tidak menjadi faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa. Dalam konteks ini, hasil positif menunjukkan bahwa ketika pengelolaan DD meningkat, kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan yang signifikan. Sebaliknya, ketika pengelolaan DD menurun, kesejahteraan masyarakat di desa tersebut juga cenderung menurun. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa penggunaan DD dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan oleh seluruh warga desa secara merata.

2.5.2 Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Fitriyah dalam (Khairunnisa et al., 2017), pembangunan infrastruktur merupakan salah satu dinamika penting dalam organisasi publik yang harus dijalankan untuk mendukung pengembangan wilayah. Infrastruktur yang memadai menjadi determinan krusial dalam menopang kelancaran kegiatan sosial ekonomi di suatu daerah. Kehadiran infrastruktur yang memadai tidak hanya memperlancar kegiatan perekonomian, tetapi juga memfasilitasi pembangunan secara keseluruhan. Tanpa infrastruktur yang memadai, aktivitas ekonomi cenderung terhambat, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan dan pembangunan wilayah tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fajri, 2017)

menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan desa memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Yasa, 2022) bahwa pembangunan infrastruktur tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Artinya, pembangunan infrastruktur tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Pembangunan infrastruktur tidak menjadi faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Pengaruh tersebut dianggap positif ketika DD yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan desa secara umum semakin besar. Contohnya, pembangunan fasilitas jalan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya dapat membantu mempermudah aktivitas masyarakat dalam berbagai aspek perekonomian mereka, sehingga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, hasil yang negatif akan terjadi jika pembangunan infrastruktur desa tidak memadai. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dalam mengakses fasilitas-fasilitas desa yang penting, seperti sekolah, puskesmas, dan pasar. Kesulitan ini akan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat serta dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memberikan

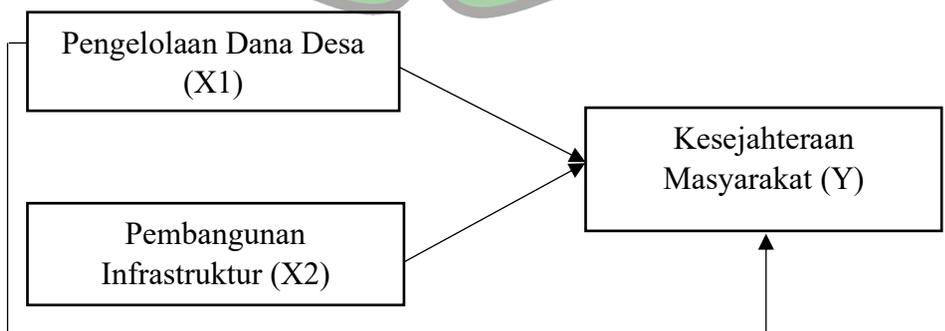
perhatian yang cukup pada pembangunan infrastruktur, sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

2.5.3 Pengaruh Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Kesejahteraan masyarakat

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Panjaitan & Damanik, 2023) dan (Panjaitan & Damanik, 2023) menunjukkan bahwa variable pengelolaan DD dan pembangunan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kedua penelitian tersebut membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat. Ini berarti bahwa semakin baik pengelolaan DD dan pembangunan infrastruktur di suatu desa, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Sebaliknya, jika pengelolaan DD dan pembangunan infrastruktur menurun, maka kesejahteraan masyarakat di desa tersebut juga cenderung mengalami penurunan.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah (2023)

Kerangka pemikiran diatas menjelaskan variabel independen yaitu Pengelolaan Dana Desa dan pembangunna infrastruktur, sedangkan variabel dependen yaitu kesejahteraan masyarakat. Dari Gambar 2.2 diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan DD dan pembangunan infrastruktur terhadap kesjahteraan masyarakat di Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Variabel Independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun variabel bebas pada penelitian ini adalah Pengelolaan DD dan pembangunan infrastruktur (X).
2. Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel terikat. Adapaun yang menjadi variabel terikat pada penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar (Y).

2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara karena kebenarannya masih perlu di uji dan di tes kebenarannya dengan data lapangan. Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang diajukan sebagai judul awal adalah sebagai berikut:

- Ha₁ : Pengelolaan DD berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.
- H0₁ : Pengelolaan DD tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.
- Ha₂ : Pembangunan Infrastruktur berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.
- H0₂ : Pembangunan infrastruktur tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.
- Ha₃ : Pengelolaan DD dan pembangunan infrastruktur secara simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.
- H0₃ : Pengelolaan DD dan pembangunan infrastruktur secara simultan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik kabupaten Aceh Besar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang didasarkan pada filsafat positivisme. Metode ini digunakan untuk menyelidiki populasi atau sampel tertentu, di mana teknik pengambilan sampel biasanya dilakukan secara acak. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data dilakukan secara kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019). Penelitian kuantitatif adalah suatu bentuk penelitian ilmiah yang mengkaji satu permasalahan dari suatu fenomena, serta melihat kemungkinan kaitan atau hubungan-hubungan antar variable dalam permasalahan yang ditetapkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan survei, yang menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian. Pendekatan kuantitatif dipilih oleh peneliti untuk menganalisis pengelolaan DD dan pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah di Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.

3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari tanggapan para responden yaitu melalui wawancara langsung kepada perangkat desa dan membagikan kuesioner kepada masyarakat Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.

3.2.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen-dokumen dan laporan-laporan serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3.3 Teknik Perolehan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk menghimpun informasi dan fakta yang diperlukan dalam penelitian. Dalam konteks ini, karena penelitian ini menggunakan data primer, peneliti memutuskan untuk menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data. Kuesioner merupakan instrumen pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi dari responden melalui pertanyaan-pertanyaan tertulis. Peneliti memilih kuesioner karena dianggap sesuai untuk menjangkau responden dengan jumlah yang besar.

Kuesioner berupa pertanyaan tertutup atau terbuka, dan dapat disebarkan kepada responden secara langsung atau melalui internet (Sugiyono, 2019). Dalam konteks ini, kuesioner yang digunakan

untuk mengumpulkan data primer diperiksa terlebih dahulu diuji untuk ketepatan pertanyaan atau pernyataannya. Hal ini bertujuan agar dapat dipahami dengan baik oleh responden, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Setelah mendapatkan data dari kuesioner yang diberikan kepada masyarakat, peneliti akan menggunakan perangkat lunak e-views untuk menganalisis data yang diperoleh di lapangan.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi merupakan area generalisasi yang mencakup objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk studi dan penarikan kesimpulan. (Sugiyono, 2019) Wilayah generalisasi yang mencakup objek dan subjek dengan kualitas dan karakteristik yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian disimpulkan hasilnya disebut sebagai populasi. (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh masyarakat Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik dengan jumlah 750 masyarakat (Kantor Desa Lamme Garot, 2023).

3.4.2 Sampel

Sampel adalah wakil populasi atau bagian dari populasi yang akan diteliti. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur dan syarat-syarat tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Siyoto dan Sodik,

2015). Adapun sampel yang diambil dari populasi yang telah ditentukan menggunakan Rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

(3.1)

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Total Populasi

e = Batas Toleransi Eror (10%)

Diketahui:

$N = 750$, $e = 10\%$

$$n = \frac{750}{1 + 750(0,1)^2}$$

$$n = \frac{750}{8,5}$$

= 88 orang

Jadi, jumlah sampel yang diteliti ialah sebanyak 88 responden.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. Menurut (Sugiyono, 2019), *simple random sampling* merupakan teknik yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi secara acak sederhana, sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. *Simple random sampling* umumnya digunakan ketika populasi memiliki karakteristik yang homogen. Proses pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan memilih individu

sampel dan lokasi yang mewakili populasi dan wilayah secara keseluruhan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian. Responden diminta untuk memilih jawaban yang telah disediakan dalam kuesioner tersebut. Penelitian ini mengkaji fenomena sosial yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang kemudian disebut sebagai variabel penelitian (Sugiyono, 2019).

3.6 Skala Pengukuran

Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval dalam alat ukur, sehingga alat tersebut menghasilkan data kuantitatif saat digunakan. Dalam penelitian ini, skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur nilai variabel adalah skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap fenomena sosial tertentu. Fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti dan disebut sebagai variabel penelitian (Sugiyono, 2017).

Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang. Skala *likert* memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang bersifat numerik dari tanggapan responden terhadap berbagai pernyataan atau pertanyaan yang disusun dalam

kuesioner. Responden diminta untuk menunjukkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap setiap pernyataan, biasanya pada skala dengan beberapa tingkatan, misalnya dari "sangat setuju" hingga "sangat tidak setuju". Penggunaan skala *likert* mempermudah analisis statistik karena setiap pilihan jawaban diberikan bobot numerik yang dapat diolah secara kuantitatif.

Tabel 3.1
Skala Likert

| No. | Jawaban | Kode |
|-----|---------------------|------|
| 1 | Sangat Tidak Setuju | STS |
| 2 | Tidak Setuju | TS |
| 3 | Netral | N |
| 4 | Setuju | S |
| 5 | Sangat Setuju | SS |

Sumber: Sugiyono (2019)

Skala 1 sampai 5 digunakan untuk memudahkan responden dalam menjawab pernyataan yang diajukan. Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab oleh responden berdasarkan skala likert tersebut.

3.7 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah aspek, karakteristik, atau elemen yang bervariasi dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dianalisis dalam suatu studi. Dalam konteks penelitian, terdapat dua jenis variabel yang utama, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah faktor atau kondisi yang memiliki pengaruh atau memengaruhi terjadinya perubahan pada

variabel dependen. Di sisi lain, variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen dan menjadi hasil atau respons dari perubahan pada variabel tersebut. Dengan demikian, variabel independen bertindak sebagai penyebab atau faktor yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependen adalah hasil dari interaksi atau pengaruh variabel independent (Sugiyono, 2016).

3.7.1 Kesejahteraan Masyarakat sebagai Y

Menurut (Soetomo, 2014) kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. Makna masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan hidupnya diliputi keamanan dan keselamatan sehingga merasakan kemakmuran.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini merupakan indikator menurut (Sodiq, 2015) yaitu:

1. Memelihara Agama (*hifz ad-din*)

Memelihara agama (*hifz ad-din*) diartikan bahwa dalam menjaga keberagamaan, setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinan dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan mereka. Dalam Islam, tujuan hidup utama adalah beribadah kepada Allah, yang merupakan prioritas tertinggi dalam kehidupan manusia.

2. Memelihara Jiwa (*hifz an-nafs*)

Memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) diartikan bahwa pemeliharaan kesejahteraan mencakup penghapusan segala hal yang dapat mengancam kehidupan seseorang. Ini dapat dinilai dari berbagai faktor, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, air bersih, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya. Jika kebutuhan-kebutuhan ini diabaikan, dapat mengancam eksistensi atau kelangsungan hidup seseorang.

3. Memelihara Akal (*hifz al-'aql*)

Memelihara akal (*hifz al-'aql*) yaitu memperhatikan segala hal yang dapat mengancam integritas dan fungsi akal atau pikiran seseorang. Pemeliharaan akal dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menghindari minuman beralkohol, karena penyalahgunaannya dapat mengganggu fungsi akal. Selain itu, untuk menjaga akal tetap sehat, disarankan untuk terus mencari ilmu dan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan,

4. Memelihara Keturunan (*hifz an-nasl*)

Memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) dapat dimaknai melindungi dan mempertahankan kelangsungan keturunan dari segala hal yang dapat mengancamnya. Islam memberikan perlindungan terhadap keturunan dengan mewajibkan pernikahan dan mengharamkan perzinaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar keturunan memiliki nasab

atau silsilah yang jelas. Tujuan utama dari perlindungan terhadap keturunan adalah untuk melindungi mereka dari hal-hal yang dapat merugikan keturunan atau keluarga secara keseluruhan.

5. Memelihara Harta (*hifz al-mal*)

Memelihara harta (*hifz al-mal*) yaitu terjanganya eksistensi harta melalui perlindungan, pengaturan kepemilikan, dan larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah. Harta merupakan salah satu elemen penting bagi manusia untuk mempertahankan hidupnya, dan manusia tidak dapat menghindari penggunaan harta dalam kehidupannya. Manusia bekerja keras untuk mencari harta guna menjaga kelangsungan hidupnya, sekaligus sebagai wujud dari ketaqwaannya kepada Allah SWT. Oleh karena itu, perlindungan terhadap harta sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan syariat Islam.

3.7.2 Pengelolaan Dana Desa sebagai X1

Pengelolaan DD sendiri sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah Proses kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, peraturan desa, laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Menurut A. Saibanai dalam (Amsyal et al., 2021) DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara yang diperuntukan bagi Desa dan di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil indikator menurut (Astuti & Yulianto, 2016) terdapat beberapa aspek dalam pengelolaan DD yang dikombinasikan dengan perspektif ekonomi syariah yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi, keterbukaan di mana seluruh kegiatan pemerintahan dikelola secara terbuka, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa yang jujur dan benar. Transparansi merupakan konsep penting dalam ekonomi Islam, yang berarti memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada semua pihak yang terlibat.
2. Akuntabilitas, kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam Islam diturunkan dari konsep tauhid dan kepemilikan. Berdasarkan dua konsep tersebut, diturunkan cara pandang terhadap pelaksanaan tanggung jawab dan

mengarahkan seseorang tidak melakukan kecurangan maupun korupsi.

3. Partisipasi, peran aktif setiap anggota masyarakat dalam menentukan kebijakan publik, yang menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa.

3.7.3 Pembangunan Infrastruktur sebagai X2

Menurut Fitriyah dalam (Khairunnisa et al., 2017) pembangunan infrastruktur merupakan dinamika organisasi publik yang harus dilakukan untuk mendukung pengembangan wilayah. Pembangunan infrastruktur merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi pada suatu daerah karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai kegiatan perekonomian kurang lancar dan dapat menghambat pembangunan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil indikator menurut Adisasmita dalam (Mlik, 2022) dalam pembangunan desa yang dikombinasikan dengan perspektif ekonomi syariah yaitu:

1. Transparansi, adanya keterbukaan dalam proses pembangunan dalam upaya memajukan bidang sosial dan ekonomi dengan menghormati dan melindungi hak masyarakat, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
2. Partisipatif, perencanaan dengan mengikut sertakan masyarakat dalam musyawarah.

3. Dapat dinikmati masyarakat dan dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat.
4. Akuntabilitas, pelaksanaan yang tanggung jawab dan mengarahkan seseorang tidak melakukan kecurangan maupun korupsi.
5. Sustainable (berkelanjutan) dan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel Penelitian

| Variabel | Definisi | Indikator | Skala |
|---|---|--|---------------|
| Penelolaan DD (X ₁) | Pengelolaan DD sendiri sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah proses kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, peraturan desa, laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi, kegiatan pemerintahan dikelola secara terbuka. 2. Akuntabilitas, memberikan pertanggungjawaban kinerja. 3. Partisipasi, masyarakat mempunyai suara dalam penentuan (Astuti & Yulianto, 2016). | <i>Likert</i> |
| Pembangunan Infrastruktur (X ₂) | Pembangunan infrastruktur merupakan dinamika organisasi publik yang harus dilakukan untuk mendukung pengembangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi, adanya keterbukaan dalam proses pembangunan. 2. Partisipatif, perencanaan dengan mengikut sertakan | <i>Likert</i> |

| | | | |
|------------------------------|---|--|---------------|
| | wilayah. Pembangunan infrastruktur merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi pada suatu daerah karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai kegiatan perekonomian kurang lancar dan dapat menghambat Pembangunan (Fitriyah dalam Khairunnisa et al., 2017). | <p>masyarakat dalam musyawarah.</p> <p>3. Dapat dinikmati masyarakat dan dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat.</p> <p>4. Akuntabilitas, pelaksanaan yang tanggung jawab. Sustainable atau berkelanjutan (Adisamita dalam Mlik, 2022).</p> | |
| Kesejahteraan Masyarakat (Y) | Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi (Soetomo (2014:47). | <p>1. Memelihara Agama (<i>hifz ad-din</i>).</p> <p>2. Memelihara Jiwa (<i>hifz an-nafs</i>).</p> <p>3. Memelihara Akal (<i>hifz al - 'aql</i>).</p> <p>4. Memelihara Keturunan (<i>hifz an-nasl</i>).</p> <p>Memelihara Harta (<i>hifz al-mal</i>) (Sodiq, 2015).</p> | <i>Likert</i> |

Sumber: Data Diolah (2023)

3.8 Instrumen Penelitian

3.8.1 Uji Validitas

Validitas merupakan metode atau serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengukur suatu konsep tertentu dan memastikan apakah suatu item pertanyaan dianggap valid (Sarjono & Julianita,

2011). Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah butir-butir dalam sebuah daftar pertanyaan (konstruk) layak digunakan untuk mendefinisikan suatu variabel. Instrumen yang valid berarti alat ukur tersebut mampu mengumpulkan data yang akurat. Validitas menunjukkan jika instrumen tersebut dapat mengukur apa yang memang seharusnya diukur (Mlik, 2022). Uji validitas diukur dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk $df = n-2$ dengan $\alpha 0,05$.

Adapun dasar pengambilan keputusan dari uji validitas yaitu:

1. Jika r hitung $>$ r tabel, maka kuesioner tersebut dinyatakan valid.
2. Jika r hitung $<$ r tabel, maka kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid.

3.8.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan sejauh mana data yang diperoleh melalui instrumen penelitian memiliki tingkat keandalan yang dapat dipercaya (Juiandi & Manurung, 2015). Uji ini dilakukan untuk mengetahui konsistensi hasil pengukuran jika dilakukan pengukuran ulang terhadap gejala dan alat ukur yang sama. Reliabilitas menunjukkan tingkat keandalan tertentu. Reliable berarti dapat dipercaya dan diandalkan. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan teknik alpha cronbach, di mana reliabilitas instrumen dianggap andal jika memiliki koefisien reliabilitas $\geq 0,60$ (Ghozali, 2016).

Adapun ketentuan untuk menetapkan tingkat reliabilitas didasarkan ketentuan berikut ini:

1. Jika nilai Cronbach alpha $> 0,60$, maka kuesioner tersebut dinyatakan reliabel.
2. Jika nilai Cronbach alpha $< 0,60$, maka kuesioner tersebut dinyatakan tidak reliabel.

3.9 Uji Asumsi Klasik

3.9.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menentukan apakah data dalam penelitian tersebut terdistribusi secara normal atau tidak normal. Data yang terdistribusi normal akan lebih baik digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk, di mana nilai signifikan $> 0,05$ menunjukkan data terdistribusi normal.

Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas yaitu (Sarjono & Julianita, 2013):

1. Jika Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk > 0.05 , maka data terdistribusi secara normal.
2. Jika Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk < 0.05 , maka data tidak terdistribusi secara normal.

3.9.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya hubungan antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya menunjukkan tidak terjadinya korelasi diantara variabel bebas, jika variabel bebas saling berhubungan maka variabel-variabel ini tidak orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. Multikolinieritas akan dilihat dari VIF (Variance Inflation Factor), Jika nilai tolerance rendah maka sama dengan nilai VIF tinggi dan jika dengan nilai tolerance $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 untuk menunjukkan adanya multikolonieritas terhadap data yang di uji (Emylia & Mildawati, 2019).

3.9.3 Uji Heteroskedestisitas

Dalam penelitian (Ghozali, 2016) menjelaskan bahwa Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah ada ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas. jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dalam riset ini akan menggunakan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu dengan ZPRED dengan residual SRESID. Deteksi dilakukan dengan melihat adanya pola tertentu dalam grafik yang terjadi antara sumbu Y yang telah diprediksi dan sumbu X yang telah distudentized.

3.10 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berfungsi untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat dengan skala pengukuran rasio dalam suatu persamaan linear. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk memahami sejauh mana variabel bebas (independen) mempengaruhi variabel terikat (dependen). Dalam penelitian ini, analisis regresi digunakan untuk menguji pengaruh pengelolaan DD dan pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Lamme Garot, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar. Melalui analisis regresi, peneliti dapat menentukan hubungan yang signifikan antara variabel-variabel tersebut, serta mengukur seberapa besar kontribusi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + e \quad (3.2)$$

Keterangan:

Y = Variabel Kesejahteraan Masyarakat

a = Konstanta

$b_1 b_2$ = Koefisien Regresi

x_1 = DD

x_2 = Pembangunan Infrastruktur

e = error

3.11 Uji Hipotesis

3.11.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t merupakan bentuk pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji parsial ini dilakukan untuk membuktikan sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam uji parsial adalah sebagai berikut:

1. Jika signifikansi (probabilitas) $< 0,05$ atau t hitung $> t$ tabel, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika signifikansi (probabilitas) $> 0,05$ atau t hitung $< t$ tabel, maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.11.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam Uji F adalah sebagai berikut:

1. Jika H_0 ditolak dan H_a diterima, atau jika f hitung $> f$ table, atau jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel independent berpengaruh signifikan terhadap variabel independent.

2. Jika H_0 diterima dan H_a ditolak, atau jika $f_{hitung} < f_{table}$, atau jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.11.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 atau koefisien determinasi, menggambarkan seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar nilai R^2 , semakin besar juga peran variabel independen dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen. Koefisien determinasi juga digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai koefisien determinasi mendekati 1, maka model regresi tersebut baik dan dapat memberikan informasi yang signifikan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Namun, jika nilai koefisien determinasi mendekati 0, model tersebut tidak dapat menjelaskan variasi variabel dependen secara keseluruhan (Ghozali, 2016).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Secara geografis Desa Lamme Garot termasuk pada Kecamatan Montasik Aceh Besar dengan luas wilayah 115 Ha, secara administrasi dan geografis Desa Lamme Garot Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Reudep, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Weubada, Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teubangphui Mesjid dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Krueng Aceh.

Pada umumnya lahan yang terdapat di wilayah Desa Lamme Garot hanya sedikit digunakan secara produktif. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Desa Lamme Garot memiliki sumber daya alam yang memadai dan siap untuk diolah. Luas tanah Desa Lamme Garot 115 Ha dan untuk lebih jelasnya mengenai luas tanah dan penggunaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Luas Lahan menurut Jenis Penggunaan Tahun 2016

| Jenis Lahan | Luas |
|-----------------------|-------|
| Pemukiman | 40 Ha |
| Persawahan | 15 Ha |
| Perkebunan | 8 Ha |
| Lahan Perkuburan Umum | 2 Ha |

Sumber Data: Badan Statistik, Kabupaten Aceh Besar (2016)

Jumlah penduduk Desa Lamme Garot yang tersebar di 3 dusun berdasarkan data yang diperoleh saat observasi awal tercatat

sebanyak 750 Jiwa, terdiri dari laki-laki 310 jiwa, perempuan 440 jiwa pada tahun 2024 sekarang ini.

Kebudayaan yang ada di Desa Lamme Garot merupakan modal dasar pembangunan yang melandasi pembangunan yang akan dilaksanakan, warisan budaya yang bernilai luhur merupakan modal dasar dalam rangka pengembangan budaya yang dijiwai oleh mayoritas keluhuran nilai agama islam. Salah satu aspek yang ditangani dan terus dilestarikan secara berkelanjutan adalah pembinaan berbagai kelompok kesenian, kelompok dalail khairat, panitia pengadaan kenduri hari besar Islam. Sarana dan Prasarana di Desa merupakan infrastruktur yang telah dibangun dari program maupun yang akan dibangun oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Desa Lamme Garot telah berhasil melaksanakan pembangunan beberapa infrastruktur, namun dengan luas wilayah dan keterbatasan keuangan tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi sehingga perlu pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan yang telah diruangkan dalam RPJM Desa. Hubungan pemerintah dengan masyarakat yang terjalin baik, juga menjadi kekuatan Desa Lamme Garot dalam pengelolaan pemerintahan dan kemasyarakatan. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari adanya administrasi pemerintahan Desa yang memadai, serta berfungsinya struktur pemerintahan Desa itu sendiri.

Secara umum masyarakat di Desa memiliki mata pencaharian sebagai petani, dan sebagian lagi tersebar ke dalam

beberapa bidang pekerjaan seperti: pedagang, wira swasta, PNS/TNI/POLRI, peternak, buruh, pertukangan, penjahit, dan lain-lainnya. Pada umumnya yang bekerja di sektor pertanian memiliki mata pencaharian variatif/ganda karena peluang penghasilan yang akan menunggu panen yang sangat dipengaruhi oleh musim, kondisi cuaca, hama dan waktu. Sosial dan budaya sebelum tsunami tatanan kehidupan masyarakat Desa Lamme Garot sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, di mana kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan sangat berjalan dan dipelihara, hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat. Di mana dalam agama Islam memang sangat ditekankan untuk saling berkasih sayang, membantu meringankan beban saudaranya, dan dituntut pula untuk membina dan memelihara hubungan ukhwah Islamiah antar sesama. Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik.

Aceh merupakan daerah konflik yang cukup panjang, hal ini sangat mempengaruhi dari tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dari daerah lain. Dengan lamanya waktu konflik ditambah musibah gempa dan tsunami yang terjadi Tahun 2004 maka mempengaruhi lambannya pertumbuhan tingkat kesejahteraan rakyat Aceh dan masyarakat Kecamatan Montasik khususnya. Namun setelah musibah tsunami datanglah hikmah, banyak hal terjadi seperti berhentinya konflik, kedatangan donatur baik dari dalam negeri maupun dari seluruh penjuru dunia, maka tingkat kesejahteraan

masyarakat mengalami kenaikan yang signifikan dari kondisi sebelumnya. Dan pasca tsunami kondisi ini perlahan juga mulai pulih meskipun tidak sama seperti sebelum tsunami.

4.1.2 Sejarah Desa Lamme Garot

Menurut sejarah Desa dari para tetua, nama Lamme berasal dari dua suku kata yang sangat berbeda yaitu: Lamme dan Garot. Adapun proses terjadinya sejarah Desa Lamme Garot juga nantinya dikenal nama tersebut, pada masa Sultan Iskandar Muda dalam usaha beliau memadu kekuatan militer untuk menyerang Johor di Malaysia sekarang. Ketika itu pasukan tentara Aceh berangkat dari pesisir timur Aceh dari banyak daerah, singkat cerita, para tentara Sultan Iskandar Muda melakukan perjalanan menuju daerahdaerah pemukiman yang terletak di pesisir atau sepanjang Krung Aceh. Setibanya pasukan di daerah kemukiman yang sedang kita paparkan ini untuk menuju ke permukiman berikutnya pasukan terhadang oleh belukar pohon Garoet (sejenis belukar berduri dan batangnya menjalar) sehingga susah untuk dilaluinya. Karena bila tersusuk dengan duri tersebut badan kita terasa sakit dan dapat menimbulkan demam panas karena pada durinya mengandung racun dan bisa

Akibat dari terhadangnya pasukan oleh pohon si Garoet pasukan terpaksa berhenti dan secara tidak didasari menimbulkan kemarahan, yang dalam kemarahan ini menimbulkan kata-kata kasar (teumeunak = caci maki) dengan kata-kata “Lamma bak Garoet ” Dengan arti Lamma = dalam Ibu (masuk ke dalam badan ibu) dengan pengertian tidak mungkin dilakukan sama sekali atau dengan

kata lain tidak mungkin ditempuh lagi, sedangkan bak berartikan pohon. Dari proses perkembangan sejarah, kata-kata Lamma ini berubah menjadi Lamme sedangkan Bak Garoet disebut dengan kata Garoet Saja. Dengan demikian sebutan sebutan untuk daerah pemukiman ini disebut menjadi “Lamme Garoet”.

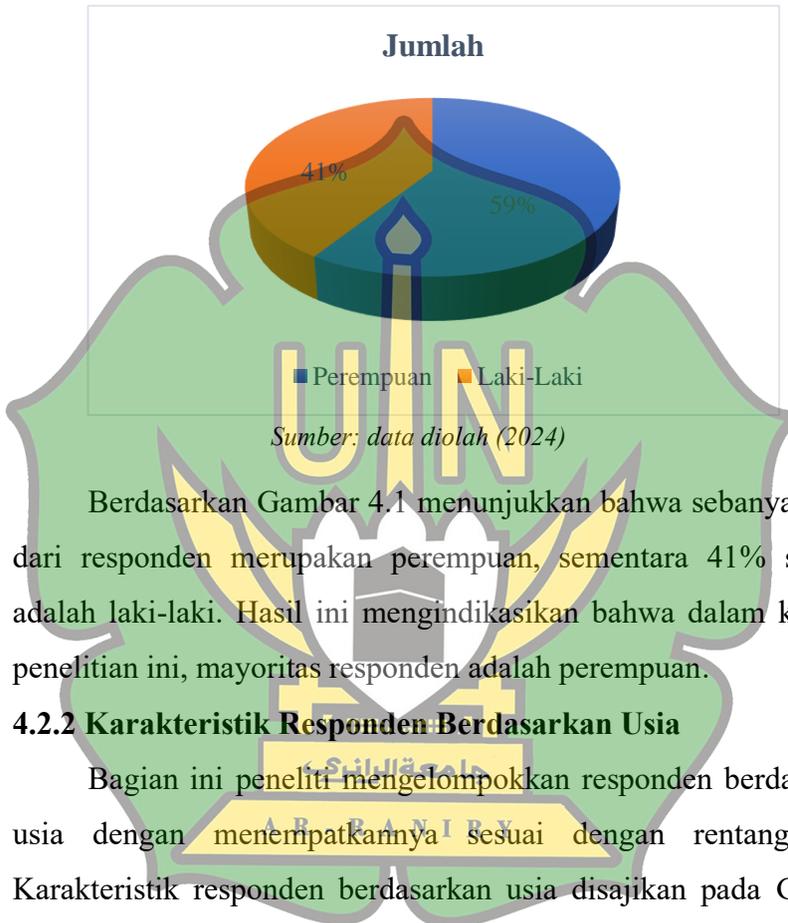
4.2 Karakteristik Responden

Responden pada penelitian ini merupakan sampel dari 88 masyarakat Desa Lamme Garot. Pada bagian ini menjelaskan mengenai karakteristik responden penelitian untuk menggambarkan data-data deskriptif yang telah diperoleh dari responden. Penulis akan menjelaskan karakteristik responden yang telah dikumpulkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dalam kelanjutan analisis. Karakteristik responden yang diamati diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir.

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin dalam pengolahan data primer hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengelompokkan responden berdasarkan jenis kelamin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

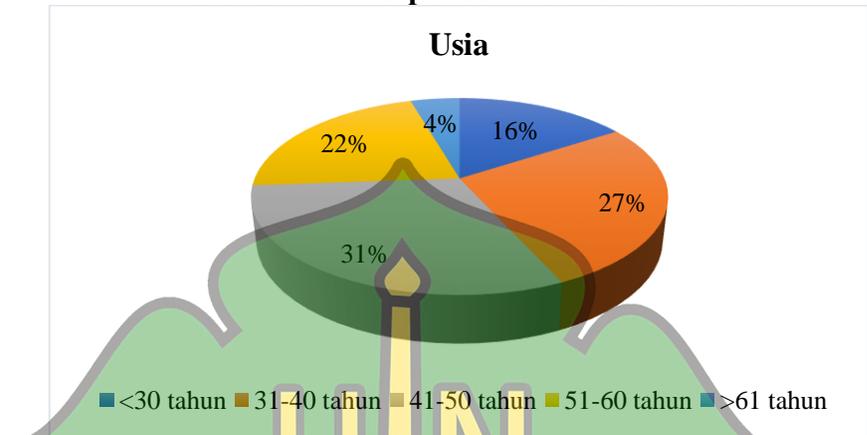


Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa sebanyak 59% dari responden merupakan perempuan, sementara 41% sisanya adalah laki-laki. Hasil ini mengindikasikan bahwa dalam konteks penelitian ini, mayoritas responden adalah perempuan.

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Bagian ini peneliti mengelompokkan responden berdasarkan usia dengan menempatkannya sesuai dengan rentang usia. Karakteristik responden berdasarkan usia disajikan pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia



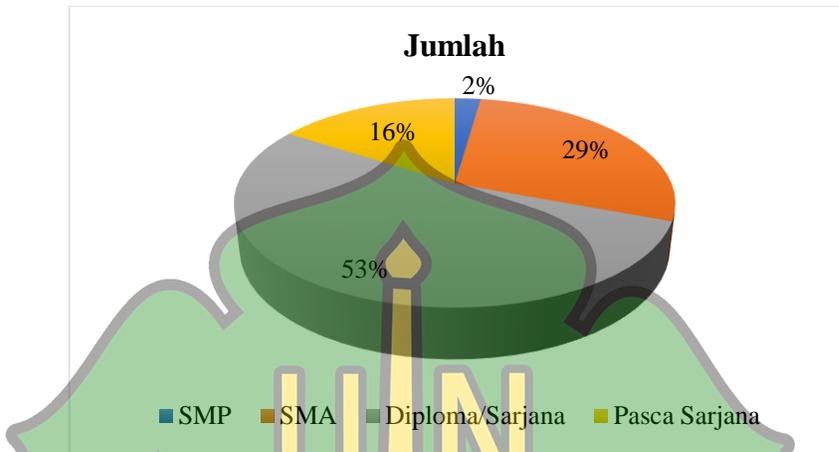
Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan Gambar 4.2 menunjukkan bahwa sebanyak 16% dari responden berusia ≤ 30 tahun. Sebanyak 27% dari responden berusia 31 – 40 tahun. Sebanyak 31% dari responden berusia 41 – 50 tahun. Sebanyak 22% dari responden berusia 51 – 60 tahun, sementara 4% sisanya responden berusia ≥ 61 tahun. Hasil ini mengindikasikan bahwa dalam konteks penelitian ini, mayoritas responden berusia 41 – 50 tahun.

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Bagian ini memberikan informasi tentang keadaan umum responden berdasarkan Pendidikan terakhir. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir disajikan pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan Gambar 4.3 menunjukkan bahwa sebanyak 2% dari responden berpendidikan terakhir SMP. Sebanyak 29% dari responden berpendidikan terakhir SMA. Sebanyak 53% dari responden berpendidikan terakhir Diploma/Sarjana, sementara 16% sisanya responden berpendidikan terakhir Pasca Sarjana.

4.3 Uji Instrumen Penelitian

Hasil penelitian yang memanfaatkan kuesioner sebagai alat penelitian sangat bergantung pada kualitas kuesioner yang digunakan. Untuk menilai keakuratan pertanyaan dalam kuesioner, dilakukannya analisis validitas, sementara untuk menilai konsistensi pertanyaan dalam kuesioner, dilakukan analisis reliabilitas.

4.3.1 Uji Validitas

Validitas ini pada dasarnya digunakan untuk melihat kesamaan antara yang terkumpul dengan data yang sebenarnya terjadi dalam

objek penelitian, sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. uji validitas dapat dihitung dengan melakukan perbandingan antara nilai r hitung dengan nilai r tabel. Apabila r hitung $>$ r tabel dan memiliki nilai positif, maka pertanyaan yang di uji dikatakan valid. Kriteria penilaian uji validitas yang digunakan tersebut yaitu; jika r hitung $>$ r tabel, maka komponen kuesioner dinyatakan valid, Adapun sebaliknya jika r hitung $<$ r tabel, maka komponen kuesioner dinyatakan tidak valid.

Hasil r hitung untuk setiap masing-masing pernyataan dalam kuesioner dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Variabel Pengelolaan DD (X1)

Terdapat enam pertanyaan yang digunakan untuk menilai variabel pengelolaan DD dalam penelitian ini.

Hasil uji validitas pertanyaan dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Uji Validitas

| Variabel | Indikator | R hitung | R tabel | Keterangan |
|---------------------|-----------|----------|---------|------------|
| Pengelolaan DD (X1) | X1.1 | 0,552 | 0,207 | Valid |
| | X1.2 | 0,703 | 0,207 | Valid |
| | X1.3 | 0,724 | 0,207 | Valid |
| | X1.4 | 0,669 | 0,207 | Valid |
| | X1.5 | 0,612 | 0,207 | Valid |
| | X1.6 | 0,439 | 0,207 | Valid |

Sumber: Data diolah (2024)

Analisis pada tabel 4.2 menyatakan bahwa setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki nilai validitas yang baik dalam mengukur variabel. Ini terlihat dari perbandingan yang

menunjukkan antara nilai r hitung $>$ r tabel, dengan nilai koefisien validitas semua pertanyaan di atas 0,207. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap pertanyaan terkait variabel pengelolaan DD dianggap valid, dengan r hitung $>$ r tabel, yang memberikan kesimpulan bahwa semua pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

b. Variabel Pembangunan Infrastruktur (X2)

Terdapat tujuh pertanyaan yang digunakan untuk menilai variabel pembangunan infrastruktur dalam penelitian ini. Hasil uji validitas pertanyaan dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Uji Validitas

| Variabel | Indikator | R hitung | R tabel | Keterangan |
|--------------------------------|-----------|----------|---------|------------|
| Pembangunan Infrastruktur (X2) | X2.1 | 0,476 | 0,207 | Valid |
| | X2.2 | 0,539 | 0,207 | Valid |
| | X2.3 | 0,628 | 0,207 | Valid |
| | X2.4 | 0,531 | 0,207 | Valid |
| | X2.5 | 0,630 | 0,207 | Valid |
| | X2.6 | 0,740 | 0,207 | Valid |
| | X2.7 | 0,494 | 0,207 | Valid |

Sumber: Data diolah (2024)

Analisis pada Tabel 4.3 menyatakan bahwa setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki nilai validitas yang baik dalam mengukur variabel. Ini terlihat dari perbandingan antara nilai r hitung $>$ r tabel, dengan nilai koefisien validitas semua pertanyaan di atas 0,207. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap pertanyaan terkait variabel pembangunan infrastruktur dianggap

valid, dengan r hitung $>$ r tabel, yang memberikan kesimpulan bahwa semua pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

c. Variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Terdapat dua puluh pertanyaan yang digunakan untuk menilai variabel kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini. Hasil uji validitas pertanyaan dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Uji Validitas

| Variabel | Indikator | R hitung | R tabel | Keterangan |
|------------------------------|-----------|----------|---------|------------|
| Kesejahteraan Masyarakat (Y) | Y1 | 0,358 | 0,207 | Valid |
| | Y2 | 0,273 | 0,207 | Valid |
| | Y3 | 0,258 | 0,207 | Valid |
| | Y4 | 0,252 | 0,207 | Valid |
| | Y5 | 0,218 | 0,207 | Valid |
| | Y6 | 0,381 | 0,207 | Valid |
| | Y7 | 0,467 | 0,207 | Valid |
| | Y8 | 0,315 | 0,207 | Valid |
| | Y9 | 0,343 | 0,207 | Valid |
| | Y10 | 0,378 | 0,207 | Valid |
| | Y11 | 0,335 | 0,207 | Valid |
| | Y12 | 0,602 | 0,207 | Valid |
| | Y13 | 0,326 | 0,207 | Valid |
| | Y14 | 0,496 | 0,207 | Valid |
| | Y15 | 0,271 | 0,207 | Valid |
| | Y16 | 0,355 | 0,207 | Valid |
| | Y17 | 0,596 | 0,207 | Valid |
| | Y18 | 0,515 | 0,207 | Valid |
| | Y19 | 0,358 | 0,207 | Valid |
| | Y20 | 0,292 | 0,207 | Valid |

Sumber: Data diolah (2024)

Analisis pada Tabel 4.4 menyatakan bahwa setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki nilai validitas yang baik dalam mengukur variabel. Ini terlihat dari perbandingan antara nilai r hitung $>$ r tabel, dengan nilai koefisien validitas semua pertanyaan di atas 0,207. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap pertanyaan terkait variabel kesejahteraan masyarakat dianggap valid, dengan r hitung $>$ r tabel, yang memberikan kesimpulan bahwa semua pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masing-masing indikator memiliki r hitung positif dan lebih besar dibandingkan r table yaitu sebesar 0,207. Maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator dari ketiga variable X_1 , X_2 dan Y dinyatakan valid.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana jawaban seseorang terhadap pertanyaan dapat dianggap stabil dan dapat reliabel. Data yang dikumpulkan akan dibandingkan dengan nilai koefisien Cronbach Alpha, di mana nilai di atas 0,60 dinyatakan reliabel (baik), sementara nilai di bawah 0,60 dinyatakan tidak reliabel (tidak baik). Hasil uji reliabilitas instrumen pertanyaan menggunakan SPSS dapat ditemukan dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Uji Reliabilitas

| Variabel | Reliabelitas (Alpha) | Alpha | Keterangan |
|--------------------------------|----------------------|-------|------------|
| Pengelolaan DD (X1) | 0,673 | 0,60 | Reliabel |
| Pembangunan Infrastruktur (X2) | 0,658 | 0,60 | Reliabel |
| Kesejahteraan Masyarakat (Y) | 0,653 | 0,60 | Reliabel |

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 4.5, dapat dilihat bahwa variabel pengelolaan DD (X1) dianggap reliabel karena nilai Cronbach Alpha melebihi 0,60, yaitu sebesar 0,673 ($0,673 > 0,60$), nilai variabel pembangunan infrastruktur (X2) adalah 0,658 ($0,658 > 0,60$) dan nilai variabel kesejahteraan masyarakat (Y) adalah 0,653 ($0,653 > 0,60$). Oleh karena itu, berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap pertanyaan atau instrumen dalam kuesioner baik dari variabel X maupun variabel Y memiliki nilai Cronbach Alpha $> 0,60$. Dengan demikian, keseluruhan variabel dapat dinyatakan sudah reliabel.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan kondisi statistik yang perlu dipenuhi sebelum melakukan analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini, beberapa uji asumsi klasik yang dilakukan adalah:

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual terdistribusi secara

normal. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan Kolmogorov-Smirnov (K-S), uji grafik histogram dan P-P Plot. Untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak dilakukan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Test. Residual terdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $> 0,05$.

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 88 |
| Normal Parameters ^a | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | .92888943 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .143 |
| | Positive | .143 |
| | Negative | -.094 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 1.338 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .056 |

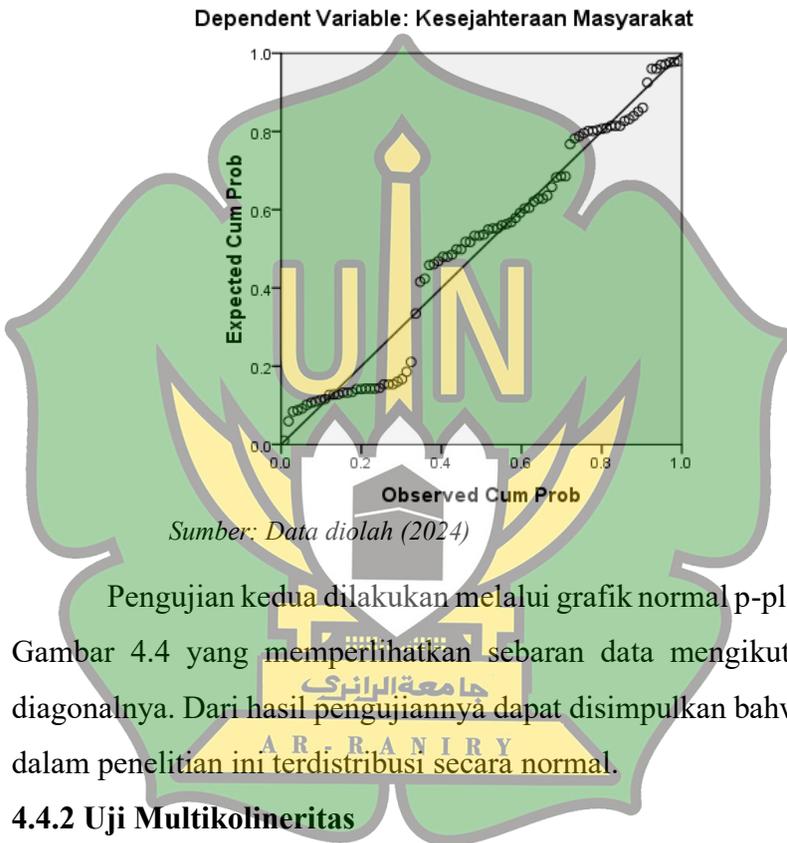
a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,056 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,056 > 0,05$). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

Gambar 4.4 Grafik P-P Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Pengujian kedua dilakukan melalui grafik normal p-plot pada Gambar 4.4 yang memperlihatkan sebaran data mengikuti garis diagonalnya. Dari hasil pengujiannya dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Variabel menunjukkan gejala multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *tolerance* dari masing-masing variabel. Suatu model regresi dapat dikatakan tidak multikolinieritas jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,10$. Hasil pengujian multikolinieritas dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas

| Model | Collinearity Statistic | |
|--------------------------------|------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| Pengelolaan DD (X1) | 0,990 | 1,011 |
| Pembangunan Infrastruktur (X2) | 0,990 | 1,011 |

Sumber: Data diolah (2024)

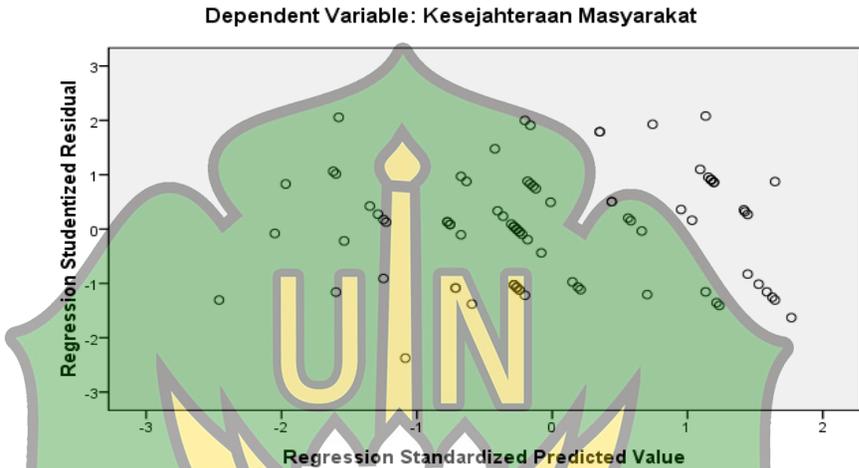
Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa seluruh nilai *tolerance* > 0,10 dengan nilai *tolerance* variabel pengelolaan DD (X1) adalah 0,990 dan nilai *tolerance* variabel pembangunan infrastruktur (X2) adalah 0,990. Sehingga tidak terjadi multikolinieritas. Sedangkan nilai VIF variabel pengelolaan DD (X1) adalah 1,011 dan nilai VIF variabel pembangunan infrastruktur (X2) adalah 1,011. Kedua variabel memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas antara variabel bebas dalam regresi ini.

4.4.3 Uji Heteroskedestisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat perbedaan dalam variansi residual antar observasi dalam model regresi. Dalam riset ini akan menggunakan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu dengan ZPRED dengan residual SRESID. Deteksi dilakukan dengan melihat adanya pola tertentu dalam grafik yang terjadi antara sumbu Y yang telah diprediksi dan sumbu X yang telah distudentized. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Gambar 4.5.

Gambar 4.5 Grafik Plot

Scatterplot



Sumber: Data diolah (2024)

Dengan merujuk pada grafik plot pada Gambar 4.5, dapat disimpulkan bahwa dalam grafik *scatterplot* terjadi penyebaran data yang tidak teratur dan tidak membentuk pola. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya heteroskedestisitas. Sehingga model regresi ini layak digunakan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan DD dan pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat.

4.5 Hasil Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah suatu analisis yang mengukur untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pengelolaan DD dan pembangunan infrastruktur sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah kesejahteraan masyarakat.

Model regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini, dan persamaan regresi dapat ditemukan dalam tabel hasil uji coefficients. Output SPSS yang menunjukkan informasi lebih lanjut yang terdapat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|
| | | B | Std. Error | | | |
| 1 | (Constant) | 64,072 | 8,115 | | 7,895 | <,001 |
| | Pengelolaan DD (X1) | -,032 | ,285 | -,013 | -,111 | ,912 |
| | Pembangunan Infrastruktur (X2) | ,591 | ,278 | ,256 | 2,131 | ,036 |

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Sumber: Data diolah (2024)

Dari Tabel 4.8, yang diperoleh melalui pengolahan SPSS, didapatkan nilai konstanta (α) sebesar 64,072 dan nilai koefisien regresi (β) untuk variabel pengelolaan DD yaitu -0,032 dan pembangunan infrastuktur yaitu 0,591.

Persamaan regresi linear berganda yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + e \quad (4.1)$$

$$Y = 64,072 - 0,032X_1 + 0,591X_2 + \varepsilon$$

Dimana:

Y = Variabel Dependent (Kesejahteraan Masyarakat)

a = Konstanta

$b_1 b_2$ = Koefisien Regresi

x_1 = Variabel Independent (Pengelolaan DD)

x_2 = Variabel Independent (Pembangunan Infrastruktur)

e = error

Berdasarkan persamaan pada tabel 4.8 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta yang didapat adalah sebesar 64,072 artinya dengan mengesampingkan variable pengelolaan DD (X_1) dan pembangunan infrastruktur (X_2), maka besarnya variable kesejahteraan masyarakat (Y) pada masyarakat Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik sebesar 64,072.
- b. Nilai koefisien regresi variabel pengelolaan DD (X_1) sebesar -0,032. Hal ini menyatakan bahwa pengelolaan DD tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada variabel pengelolaan DD memiliki arah yang berlawanan dalam pengelolaan DD, yang meningkat justru kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa pengelolaan DD yang diterapkan oleh desa lamme garot menurun dan mengakibatkan kesejahteraan masyarakat ikut menurun.

- c. Nilai koefisien regresi variabel pembangunan infrastruktur (X2) sebesar 0,591. Hal ini menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada variabel pembangunan infrastruktur jika pembangunan infrastruktur baik maka kesejahteraan masyarakat akan semakin tinggi. Setiap penambahan 1 nilai pada variabel pembangunan infrastruktur, maka variabel kesejahteraan masyarakat pada Desa Lamme garot Kecamatan Montasik akan bertambah sebesar 0,591 satuan dengan persentase sebesar 59,1%.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji model regresi variabel independen (Pengelolaan DD dan Pembangunan Infrastruktur) secara parsial berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen (Kesejahteraan Masyarakat) dengan tingkat signifikansi 0.05 secara parsial. Berikut hasil pengujian hipotesis uji t.

Tabel 4.9
Hasil Uji Secara Parsial (Uji T)

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 64,072 | 8,115 | | 7,895 | <,001 |
| | Pengelolaan DD (X1) | -,032 | ,285 | -,013 | -,111 | ,912 |
| | Pembangunan Infrastruktur (X2) | ,591 | ,278 | ,256 | 2,131 | ,036 |

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan oleh Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan koefisien regresi dengan uji t adalah sebagai berikut:

- a. Untuk variabel X1 (pengelolaan DD) diperoleh nilai t hitung - 0.111 hal ini berarti $t \text{ hitung} < t \text{ table}$ ($-0.111 < 1.988$), dengan tingkat signifikansi 0,912 ($0,921 > 0,05$). Dengan menggunakan batas 0,05, yang berarti H_a ditolak dan H_0 diterima. Dengan demikian, maka hipotesis pertama penelitian ini tidak terbukti, itu artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari Pengelolaan DD (X1) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y).
- b. Untuk variabel X2 (pembangunan infrastruktur) diperoleh nilai t hitung 2.131 hal ini berarti $t \text{ hitung} > t \text{ table}$ ($2.131 > 1,988$) dengan tingkat signifikansi 0,036 ($0,036 < 0,05$). Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 yang berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Dengan demikian, maka hipotesis kedua diterima, itu artinya terdapat pengaruh positif yang signifikan dari Pembangunan Infrastruktur (X) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y).

4.6.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F yang juga dikenal sebagai uji simultan, dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Keputusan diambil dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel atau membandingkan nilai signifikansi F hitung dengan nilai α (0,05).

Tabel 4.10
Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 148,001 | 2 | 74,001 | 2,836 | ,064 ^b |
| | Residual | 2218,078 | 85 | 26,095 | | |
| | Total | 2366,080 | 87 | | | |
| a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat (Y) | | | | | | |
| b. Predictors: (Constant), Pembangunan Infrastruktur (X2), Pengelolaan DD (X1) | | | | | | |

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil output Tabel 4.10 didapatkan nilai F hitung sebesar 2,836 dan F tabel 3,10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($2,836 < 3,10$). Sedangkan jika menggunakan batas signifikansi 0,05, maka nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,064 > 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independent yaitu pengelolaan DD (X1) dan pembangunan infrastruktur (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent yaitu kesejahteraan masyarakat.

4.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi pada dasarnya untuk untuk mengetahui Tingkat hubungan variabel independent yaitu pengelolaan DD (X1) dan Pembangunan infrastruktur (X2) secara bersamaan dengan variabel dependen yaitu kesejahteraan Masyarakat (Y) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R²)

| Model Summary | | | | |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | ,250 ^a | ,063 | ,040 | 5,108 |
| a. Predictors: (Constant), Pembangunan Infrastruktur (X2), Pengelolaan DD (X1) | | | | |
| b. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat (Y) | | | | |

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.11 diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi yang dilihat dari nilai R² (R-square) adalah sebesar 0,063 atau 6,3%. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh pengelolaan DD dan pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu sebesar 6,3%, sedangkan sisanya sebesar 93,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian ini.

4.7 Pembahasan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh pengelolaan DD, A dan Pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.

4.7.1 Pengaruh Pengelolaan DD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel. Nilai t hitung sebesar -0,111 dan t tabel sebesar 1,988. Sehingga t hitung

$< t$ tabel $(-0,111 < 1,988)$, dengan tingkat signifikansi 0,912. Dengan menggunakan batas 0.05 yang berarti H_a ditolak dan H_0 diterima. Dengan demikian, maka hipotesis pertama penelitian ini tidak terbukti, itu artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari Pengelolaan DD (X_1) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y).

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar -0,032 yang mana pada variabel pengelolaan DD memiliki arah yang berlawanan dalam pengelolaan DD, yang meningkat justru kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian ini pengelolaan DD menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Mahmud & Zulfikar, 2021) menunjukkan hasil bahwa DD berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti $< 0,05$. Pada penelitian lainnya yang dilakukan (Lengkong & Tasik, 2018) juga menunjukkan hasil bahwa DD belum memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Gambaran penyelenggaraan DD masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Fokus utama DD saat ini lebih banyak diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana daripada alokasi dana untuk program pemberdayaan masyarakat. Misalnya, banyak desa lebih memilih membangun jalan, jembatan, atau gedung serbaguna daripada menginvestasikan dana tersebut dalam pelatihan

keterampilan bagi warga atau program pengembangan ekonomi lokal.

Pengelolaan DD di Desa Lamme Garot perlu dievaluasi untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan DD yang baik seharusnya melibatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari seluruh warga desa. Dalam pengelolaan DD pada Desa Lamme Garot sendiri menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan menyebabkan program-program yang dijalankan kurang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Hal lain juga dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman atau kapasitas aparatur desa dalam mengelola dana secara efektif dan efisien yang menyebabkan menghambatnya pencapaian hasil yang optimal. Dalam beberapa kasus, kendala seperti kurangnya kapasitas aparatur desa, minimnya partisipasi masyarakat, dan potensi penyalahgunaan dana dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa. Untuk Desa Lamme Garot, langkah-langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendidikan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan, serta penerapan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Pemberdayaan masyarakat melalui musyawarah desa yang inklusif dapat memastikan bahwa DD digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas warga.

Dari perspektif syariah, pengelolaan DD di Lamme Garot harus berpegang pada prinsip-prinsip seperti amanah, keadilan, dan kemaslahatan umat. Aparatur desa harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan transparansi, memastikan distribusi dana yang adil dan merata pada semua lapisan masyarakat, serta fokus pada kegiatan yang memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kemaslahatan menekankan bahwa segala tindakan ekonomi harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, DD dapat memberikan dampak positif yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Desa Lamme Garot sesuai dengan nilai-nilai syariah. Namun jika pengelolaan DD tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ini, maka dapat dikatakan bahwa praktek tersebut belum memenuhi standar pengelolaan yang diharapkan dalam perspektif syariah.

4.7.2 Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel. Nilai t hitung sebesar 2,131 dan t tabel sebesar 1,988. Sehingga t hitung > t tabel (2,131 > 1,988) dengan tingkat signifikansi 0,036. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 yang berarti H_0 diterima dan

H0 ditolak. Dengan demikian, maka hipotesis kedua diterima, itu artinya terdapat pengaruh positif yang signifikan dari Pembangunan Infrastruktur (X2) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y).

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,591 berarti pada variabel Pembangunan Infrastruktur jika Pembangunan Infrastruktur baik maka Kesejahteraan Masyarakat pada desa lamme garot kecamatan montasik kabupaten aceh besar akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh Pembangunan infrastruktur (X2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y). Sehingga dalam penelitian ini menyatakan terdapat pengaruh Pembangunan infrastruktur dengan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fajri (2017) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan desa yang telah dibangun memberikan pengaruh yang cukup besar dan positif. Dikatakan positif ketika semakin besar DD yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan desa maka masyarakatpun akan lebih sejahtera, seperti pembangunan fasilitas jalan, pendidikan, kesehatan dan lainnya akan mampu mempermudah aktivitas masyarakat dalam aspek segala perekonomian sehingga terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya pembangunan infrastruktur, maka meningkat pula kesejahteraan masyarakat. Begitupun sebaliknya yang ditunjukkan dengan hasil negatif, apabila rendahnya pembangunan infrastruktur desa, maka

akan mempersulit masyarakat dalam mengakses fasilitas desa sehingga terhambatnya kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur di Desa Lamme Garot merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan yang baik, sistem irigasi yang efisien, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, akan mendukung aktivitas sehari-hari dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Jalan yang baik, misalnya, akan memudahkan transportasi barang dan orang, meningkatkan akses ke pasar dan layanan publik, serta mengurangi biaya logistik. Sistem irigasi yang efisien akan mendukung produktivitas pertanian, yang merupakan salah satu sumber utama penghidupan masyarakat desa. Hal ini, pada gilirannya, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Namun, pembangunan infrastruktur di Desa Lamme Garot harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Keadilan dalam pembangunan infrastruktur berarti memastikan semua warga desa mendapatkan manfaat yang setara, tanpa ada diskriminasi. Amanah mengharuskan para pemimpin dan pengelola proyek untuk bekerja dengan transparansi dan tanggung jawab, menggunakan anggaran secara efisien dan tepat sasaran. Prinsip kemaslahatan umum menekankan bahwa segala pembangunan harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat, memperbaiki kualitas hidup, dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan penerapan prinsip-prinsip

tersebut, pembangunan infrastruktur di Desa Lamme Garot tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung melalui penyediaan fasilitas yang dibutuhkan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan perspektif syariah akan membawa dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan sejahtera.

4.7.3 Pengaruh Pengelolaan DD dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan hasil uji simultan f , pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan f hitung dengan f tabel. Nilai f hitung sebesar 2,836 dan f hitung sebesar 3,10. Sehingga f hitung $>$ f tabel ($2,836 > 3,10$) dengan nilai signifikan 0,064, nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,064 > 0,05$). Artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pada desa lamme garot kecamatan montasik kabupaten aceh besar.

Hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R^2 (R-square) adalah sebesar 0,063 atau 0,63%. Hal ini berarti hubungan antara pengelolaan DD (X_1) dan Pembangunan infrastruktur (X_2) dengan Kesejahteraan Masyarakat (Y), secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen. Sehingga dalam penelitian ini menyatakan tidak terdapat pengaruh terhadap

pengelolaan DD dan Pembangunan infrastruktur secara simultan dengan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan DD di Desa Lamme Garot perlu dievaluasi agar penggunaannya efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan yang baik harus melibatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif warga. Saat ini, minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan serta kurangnya kapasitas aparatur desa menghambat pencapaian hasil optimal. Langkah yang perlu diambil meliputi peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penerapan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Dari perspektif syariah, pengelolaan DD harus berdasarkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan umum. Aparatur desa harus bertanggung jawab dan transparan, memastikan distribusi dana yang adil, dan fokus pada kegiatan yang bermanfaat maksimal bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan pendidikan dan kesehatan. Jika pengelolaan dana tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ini, maka praktik tersebut belum memenuhi standar syariah.

Pembangunan infrastruktur di Desa Lamme Garot sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur seperti jalan yang baik, sistem irigasi yang efisien, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai akan mendukung aktivitas harian dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Jalan yang baik memudahkan transportasi, meningkatkan akses ke pasar

dan layanan publik, serta mengurangi biaya logistik. Sistem irigasi yang efisien akan mendukung produktivitas pertanian, yang merupakan sumber utama penghidupan masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas hidup. Namun, pembangunan ini harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Keadilan memastikan semua warga desa mendapatkan manfaat yang setara, tanpa diskriminasi. Amanah mengharuskan para pemimpin dan pengelola proyek bekerja dengan transparansi dan tanggung jawab, menggunakan anggaran secara efisien. Prinsip kemaslahatan menekankan bahwa pembangunan harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat, memperbaiki kualitas hidup, dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, pembangunan infrastruktur di Desa Lamme Garot akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung dan menciptakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai syariah.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu, sebagai berikut:

1. Variabel pengelolaan DD secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.
2. Variabel pembangunan infrastruktur secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.
3. Variabel pengelolaan DD (X1) dan Pembangunan infrastruktur (X2) dengan Kesejahteraan Masyarakat (Y), secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen. Sehingga dalam penelitian ini menyatakan tidak terdapat pengaruh terhadap pengelolaan DD dan pembangunan infrastruktur secara simultan dengan kesejahteraan masyarakat.

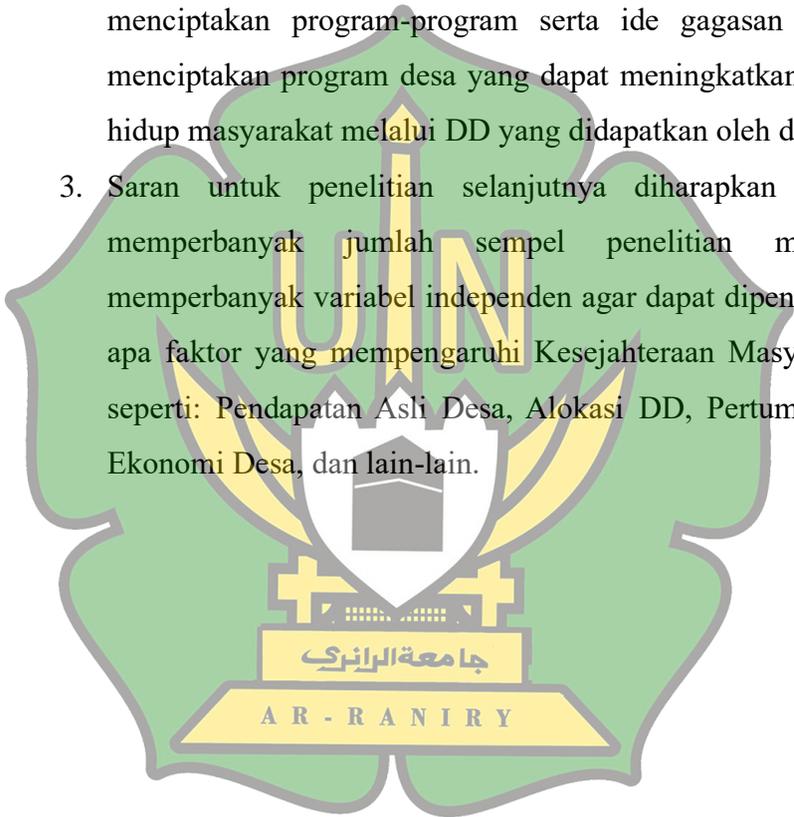
5.2 Saran

Dari penelitian yang sudah dilakukan terdapat beberapa saran yaitu, sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah desa membuat peningkatan kualitas pengelolaan DD yang belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman, kapasitas,

dan kapabilitas di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan pengawasan untuk memperbaiki pengelolaan DD tersebut.

2. Diharapkan bagi masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam menciptakan program-program serta ide gagasan untuk menciptakan program desa yang dapat meningkatkan mutu hidup masyarakat melalui DD yang didapatkan oleh desa.
3. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak jumlah sampel penelitian maupun memperbanyak variabel independen agar dapat dipengaruhi apa faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat seperti: Pendapatan Asli Desa, Alokasi DD, Pertumbuhan Ekonomi Desa, dan lain-lain.



DARTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

- Amsyal, R., Fitri, C. D., & Farma, J. (2021). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya). *Ekobis Syariah*, 4(1), 11–27.
- Asrul. (2023). Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam) Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Barat*, 05, 1–13.
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1–14.
- Ayumiati, Isnaliana, & Jalilah. (2019). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireun. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, 3(2), 61–69.
- Badan Perencanaan pembangunan Daerah. (2017). *Teori dan Indikator Pembangunan*. Diambil pada 19 November, 2023, dari <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-dan-indikator-pembangunan-12>.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023. In *Badan Pusat Statistik* (Vol. 52, Issue 9).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar. (2022). Kecamatan Montasik Dalam Angka. *BPS Kabupaten Aceh Besar*.
- Emylia, L., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan

- Desa Terhadap Kesejahteraan MAsyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(6), 2–18.
- Elvina, dan Musdhalifah. (2018). “Peningkatang Kesejahteraan Masyarakat Melalui Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Pembangunan Program Dana Desa Sebagai Variabel Intervening”. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3 (1), 1- 9.
- Fadliyati, F., Sjarlis, S., & Haeranah, H. (2023). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Belanja Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Takabonerate. *Jurnal Pelopor Manajemen*, 2(4), 198–211.
- Fajri, N. (2017). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Peningkatan Kesjehteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara). *Jurnal SIKAP*, 1(April), 11–22.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goan, K. D., & Luju, E. (2023). Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Meken Detung Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka. *Cuan : Jurnal Kewirausahaan Dan Manajemen Bisnis*, 1(2), 160–170.
- Harjono, dkk. (2014). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan anggaran*. *Binus Business Review*. Vol.5, No.2, Hlm.537-550.
- Khairunnisa, N., Furqani, H., & Amanatillah, D. (2017). Bisnis Syariah Sukuk dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia (Analisis Peran dan Manfaat Sukuk Untuk Pembangunan Indonesia). *Prodi Ekonomi Syariah*, 1(2), 11–29.
- Indrawati, S.,M. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ladiku, S., Sulila, I., & AnetaYanti. (2021). Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di

- Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. *Jambura Journal Administration And Public Service*, 2(1), 50–58.
- Lengkong, V. P. ., & Tasik, H. H. D. (2018). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa (Dp2D2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jmbi Unsrat (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*., 5(1), 15–28.
- Liliana. Meutia, Intan. (2017). “Pengelolaan Keuangan Dana Desa”. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 8(2), 227-249.
- Mahmud, S. A., & Zulfikar. (2021). Dana Desa, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat (studi empiris desa-desa di Kabupaten Klaten tahun 2019). *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 60, 663–669.
- Martondi, Rukiah, & Batubara, S. (2022). Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Jorong Situak Kecamatan Lembah Melintang). *Profjes*, 01(1), 66–81.
- Mattoasi, C. C., Muhammad, S., & Sudirman. (2021). Keseimbangan Model Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Kabupaten Bonebolango. *Ecoplak*, 4(1), 21–31.
- Mlik, O. (2022). Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Kampung Klawaren, Distrik Wemak, Kabupaten Sorong. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(3), 998–1007.
- Murni, S., Analiansyah, & Baihaqqi. (2020). Program Pembangunan Kampung Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif. *Ekobis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 4(1), 44–55.
- Nasution, I., & Lindawati, B. (2022). Pengaruh Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sidomulyo Kecamatan

Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang The Effect of Village Funds on Community Welfare in Sidomulyo Village , Biru-Biru District , Deli Serdang Regency. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 22(2), 200–213.

Nathania, B., & Siringo-ringo, E. D. M. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(1), hal.4.

Nurohman, Y. A., Qurniawati, R. S., & Hasyim, F. (2019). Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 35–43.

Onthini, A., & Kewo, C. (2022). Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Dan Pembangunan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Inobonto 2. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 7(3), 2237–2257.

Otheliansyah, G., & Yasni, R. (2021). Pengaruh Penyaluran Dana Desa pada Indikator Perekonomian Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 57–74.

Pakaya, W., Arham, M. A., Hasiru, R., & Sudirman, S. (2023). Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Popalo Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. *Journal of Economic and Business Education*, 1(2), 176–184.

Panjaitan, P. D., & Damanik, H. (2023). Analisis Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bah Damar Kecamatan Dolok Merawan. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 60–70.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Permata, N. I., & Fauzan, A. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa Masaran Banyuates terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam. *Jurnal Iseco*, 1(2), 19–28.

Purwana, A. E. (2013). Pembangunan dalam perspektif ekonomi islam. *Justitia Islamica*, 10(1), 1–18.

Putra, I. K. A. W. S., & Yasa, I. G. W. M. (2022). Pengaruh Infrastruktur Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, (3), 1041–1070.

Rahayu, D. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6(2), 107–116.

Rahman, Abdul. (2018) “Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat”. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(1), 17-36.

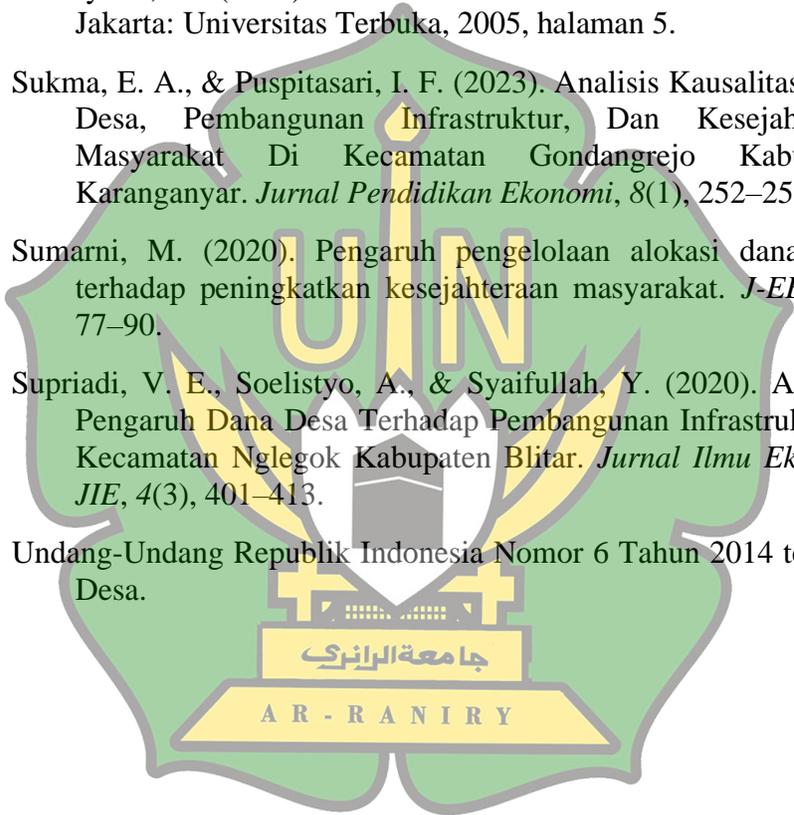
Rakhmat. 2013. *Dimensi Strategis Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rifyal, G. Z., & Annisa, T. Q. (2020). Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 203–211.

RKP Presiden Republik Indonesia. (2010). *Bab V Bidang Infrastruktur*. Jakarta : RKP Presiden.

- Rosidin, Utang. (2019). *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung:CV Pustaka Setia.
- Safarullah, F. R., Kosim, A. M., & Triwoelandari, R. (2021). Analisis Perencanaan Pelaksanaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah : Studi Kasus Dana Desa di Desa Sengon Kecamatan Tanjung , Brebes. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2(2), 235–258.
- Safina, W. D., & Sari, A. N. (2022). Pengaruh Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bandar Labuhan. *Jurnal Al-Buhuts*, 18(2), 260–267.
- Sarjono, & Julianita. (2013). *SPSSVS LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi Untuk Riset*. Jakarta: Salemba empat.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sodiq, A. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 380–405.
- Soimin. (2019). *Pembangunan Berbasis Desa*. Malang: Intrans Publishing.
- Soetomo. (2014). *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta. **A R - R A N I R Y**
- Sopriyanto, Kurniadi, S., & Adiansyah, E. (2020). Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal). *Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 2(2), 64–81.
- Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharyono, N. (2017). *Sistem Ekonomi dan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2005, halaman 5.
- Sukma, E. A., & Puspitasari, I. F. (2023). Analisis Kausalitas Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur, Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 8(1), 252–253.
- Sumarni, M. (2020). Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. *J-EBIS*, 5, 77–90.
- Supriadi, V. E., Soelistyo, A., & Syaifullah, Y. (2020). Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 4(3), 401–413.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya mahasiswa program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Memohon ketersediaan saudara/i untuk mengisi kuesioner dalam rangka pengambilam data penelitian sebagai tugas akhir saya mengenai **“Pengaruh Pengelolaan DD dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Desa Lamme Garot, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar)”**.

Sehubungan dengan hal itu, maka saya mohon kesediaan saudara/i untuk meluangkan waktunya guna mengisi kuesioner ini. Pengisian kuesioner ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Informasi yang saudara/i berikan merupakan bantuan yang sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian ini. Atas kerjasama dan bantuannya saya ucapkan terima kasih.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Peneliti

Intan Putri Zakia

I. Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Pendidikan :

II. Petunjuk Pengisian

Isilah pernyataan dibawah ini yang menurut Bapak/Ibu/Saudara/i anggap Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS) dengan memberikan tanda (✓).

Kesejahteraan Masyarakat (Y)

| No. | Pernyataan | Pilihan Jawaban | | | | |
|---|---|-----------------|---|---|----|-----|
| | | SS | S | N | TS | STS |
| Memelihara Agama  | | | | | | |
| 1. | Pengelolaan DD digunakan untuk pembangunan masjid. | | | | | |
| 2. | Pengelolaan DD digunakan untuk kegiatan hari besar Islam. | | | | | |
| 3. | Pengelolaan DD digunakan untuk kegiatan kelembagaan TPA/TPQ desa. | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 4. | Pengelolaan DD digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana keagamaan. | | | | | |
| 5. | Pengelolaan DD digunakan untuk pembangunan tempat pengajian. | | | | | |
| Memelihara Jiwa | | | | | | |
| 1. | Pengelolaan DD digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. | | | | | |
| 2. | Pengelolaan DD digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial. | | | | | |
| 4. | Pengelolaan DD digunakan untuk kelayakan air bersih. | | | | | |
| 5. | Pengelolaan DD digunakan untuk meningkatkan lingkungan desa yang aman dan nyaman. | | | | | |
| Memelihara Akal | | | | | | |
| 1. | Pengelolaan DD digunakan untuk memberikan bantuan pendidikan. | | | | | |
| 2. | Pengelolaan DD digunakan untuk memberikan pelatihan | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | maupun pembinaan kepada masyarakat. | | | | | |
| 3. | Pengelolaan DD digunakan untuk mengajak masyarakat melakukan kegiatan sosial sehingga terhindar dari kegiatan tercela. | | | | | |
| Memelihara Keturunan | | | | | | |
| 1. | Pengelolaan DD digunakan untuk memfasilitasi kegiatan posyandu. | | | | | |
| 2. | Pengelolaan DD digunakan untuk peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. | | | | | |
| 3. | Pengelolaan DD digunakan untuk memfasilitasi kegiatan ibu hamil. | | | | | |
| 4. | Pengelolaan DD mampu melibatkan perempuan desa. | | | | | |
| 5. | Pengelolaan DD digunakan untuk menjaga adat dan budaya desa. | | | | | |
| 6. | Pengelolaan DD digunakan untuk santunan anak yatim. | | | | | |
| Memelihara Harta | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 1. | Pengelolaan DD digunakan untuk kegiatan pertanian. | | | | | |
| 2. | Pengelolaan DD digunakan untuk membantu pengusaha kecil di desa. | | | | | |

Pengelolaan DD (X1)

| No. | Pernyataan | Pilihan Jawaban | | | | |
|----------------------|---|-----------------|---|---|----|-----|
| | | SS | S | N | TS | STS |
| Transparansi | | | | | | |
| 1. | DD dikelola secara transparansi dan keterbukaan. | | | | | |
| 2. | Masyarakat mampu memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa. | | | | | |
| Akuntabilitas | | | | | | |
| 1. | DD dikelola secara akuntabilitas. | | | | | |
| 2. | Adanya laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan DD. | | | | | |
| 3. | Pemerintah desa mampu mempertanggung jawabkan secara legal atas DD yang dikelola. | | | | | |

| Partisipasi | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| 1. | Masyarakat desa terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan DD. | | | | |

Pembangunan Infrastruktur (X2)

| No. | Pernyataan | Pilihan Jawaban | | | | |
|----------------------|---|-----------------|---|---|----|-----|
| | | SS | S | N | TS | STS |
| Transparansi | | | | | | |
| 1. | Adanya keterbukaan dalam proses pembangunan infrastruktur. | | | | | |
| 2. | Adanya keterbukaan mengenai pengelolaan dana dalam pembangunan infastruktur. | | | | | |
| 3. | Adanya pertimbangan dampak terhadap masyarakat serta melindungi hak masyarakat. | | | | | |
| Partisipatif | | | | | | |
| 1. | Mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan melalui musyawarah. | | | | | |
| Akuntabilitas | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 1. | Pemerintah desa mampu mempertanggung jawabkan apabila terdapat kejanggalan penggunaan dana dalam proses pembangunan infrstruktur. | | | | | |
| Sustainable (berkelanjutan) | | | | | | |
| 1. | Pemerintah desa memperhatikan aspirasi infrstruktur yang dibutuhkan masyarakat desa. | | | | | |
| 2. | Infrstruktur yang sudah dibangun dapat dinikmati dan memfasilitasi kebutuhan nasyarakat desa. | | | | | |



Lampiran 2 Tabulasi Kuesioner Penelitian

a. Pengelolaan DD (X1)

| X1.1 | X1.2 | X1.3 | X1.4 | X1.5 | X1.6 | Total |
|------|------|------|------|------|------|-------|
| 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 28 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 26 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 24 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 29 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 27 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 23 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 26 |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 25 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 26 |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 23 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 29 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 29 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 29 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 29 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 28 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 29 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 28 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 25 |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|
| 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 27 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 29 |
| 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 27 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 29 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 26 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 28 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 23 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 29 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 29 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 25 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 27 |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 25 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 26 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 26 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 25 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 23 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 27 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 29 |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 21 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 22 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 26 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 28 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 25 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 29 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 29 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 24 |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |

b. Pembangunan Infrastruktur (X2)

| X2.1 | X2.2 | X2.3 | X2.4 | X2.5 | X2.6 | X2.7 | Total |
|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 30 |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 30 |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 30 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 32 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 29 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 27 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 28 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 25 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 28 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 31 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 31 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 |
| 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 28 |
| 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 25 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 31 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 34 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 34 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 34 |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 31 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 29 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 32 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 27 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 29 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 29 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 27 |
| 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 30 |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 30 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 31 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 34 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 29 |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 28 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 29 |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 30 |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 30 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 32 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 30 |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 30 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 30 |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 30 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 27 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 31 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 32 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 31 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 33 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 31 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 28 |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 30 |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 30 |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 27 |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 29 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 29 |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 30 |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 31 |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 30 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 31 |
| 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 28 |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 30 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 31 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 30 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 30 |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 31 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 |
| 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 28 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 26 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 28 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 29 |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 30 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 32 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 |
| 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 27 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 34 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 29 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 28 |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 30 |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 30 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 29 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 27 |

c. Kesejahteraan Masyarakat (Y)

| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0 | a |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 |
| 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 |
| 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 |
| 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 |
| 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 |
| 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 |
| 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 |
| 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 |
| 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 |
| 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 |
| 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 81 |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 78 |
| 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 81 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 89 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 83 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 84 |
| 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 80 |
| 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 73 |
| 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 82 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 69 |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 78 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 71 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 86 |
| 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 97 |
| 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 77 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 74 |
| 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 83 |
| 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 82 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 78 |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 77 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 75 |

Lampiran 3 Karakteristik Responden

A. Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------|--------|
| Perempuan | 52 |
| Laki-Laki | 36 |

B. Usia

| Usia | Jumlah |
|-------------|--------|
| <30 tahun | 14 |
| 31-40 tahun | 24 |
| 41-50 tahun | 27 |
| 51-6- tahun | 19 |
| >61 tahun | 4 |

C. Pendidikan Terakhir

| Pendidikan Terakhir | Jumlah |
|---------------------|--------|
| SMP | 2 |
| SMA | 25 |
| Diploma/Sarjana | 47 |
| Pasca Sarjana | 14 |

Lampiran 4 Hasil Analisis Output

1. Uji Validitas dan Reliabelitas

a. Uji Validitas dan Reliabelitas Pengelolaan DD (X1)

a. Correlations

| | | X1.1 | X1.2 | X1.3 | X1.4 | X1.5 | X1.6 | Total_X 1 |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| X1.1 | Pearson Correlation | 1 | .278** | .519** | .121 | .173 | -.103 | .552** |
| | Sig. (2-tailed) | | .009 | .000 | .261 | .107 | .340 | .000 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| X1.2 | Pearson Correlation | .278** | 1 | .460** | .547** | .148 | .108 | .703** |
| | Sig. (2-tailed) | .009 | | .000 | .000 | .170 | .316 | .000 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| X1.3 | Pearson Correlation | .519** | .460** | 1 | .306** | .232* | .111 | .724** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | | .004 | .029 | .301 | .000 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| X1.4 | Pearson Correlation | .121 | .547** | .306** | 1 | .416** | .154 | .669** |
| | Sig. (2-tailed) | .261 | .000 | .004 | | .000 | .152 | .000 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| X1.5 | Pearson Correlation | .173 | .148 | .232* | .416** | 1 | .385** | .612** |
| | Sig. (2-tailed) | .107 | .170 | .029 | .000 | | .000 | .000 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| X1.6 | Pearson Correlation | -.103 | .108 | .111 | .154 | .385** | 1 | .439** |
| | Sig. (2-tailed) | .340 | .316 | .301 | .152 | .000 | | .000 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Total_X 1 | Pearson Correlation | .552** | .703** | .724** | .669** | .612** | .439** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

a. Correlations

| | | X1.1 | X1.2 | X1.3 | X1.4 | X1.5 | X1.6 | Total_X 1 |
|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| X1.1 | Pearson Correlation | 1 | .278** | .519** | .121 | .173 | -.103 | .552** |
| | Sig. (2-tailed) | | .009 | .000 | .261 | .107 | .340 | .000 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| X1.2 | Pearson Correlation | .278** | 1 | .460** | .547** | .148 | .108 | .703** |
| | Sig. (2-tailed) | .009 | | .000 | .000 | .170 | .316 | .000 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| X1.3 | Pearson Correlation | .519** | .460** | 1 | .306** | .232* | .111 | .724** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | | .004 | .029 | .301 | .000 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| X1.4 | Pearson Correlation | .121 | .547** | .306** | 1 | .416** | .154 | .669** |
| | Sig. (2-tailed) | .261 | .000 | .004 | | .000 | .152 | .000 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| X1.5 | Pearson Correlation | .173 | .148 | .232* | .416** | 1 | .385** | .612** |
| | Sig. (2-tailed) | .107 | .170 | .029 | .000 | | .000 | .000 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| X1.6 | Pearson Correlation | -.103 | .108 | .111 | .154 | .385** | 1 | .439** |
| | Sig. (2-tailed) | .340 | .316 | .301 | .152 | .000 | | .000 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Total_X 1 | Pearson Correlation | .552** | .703** | .724** | .669** | .612** | .439** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Cronbach's Alpha | | | | | | | | N of Items |
| | .673 | | | | | | | 6 |

b. Uji Validitas dan Reliabelitas Pembangunan Infrastruktur (X2)

Correlations

| | X2.1 | X2.2 | X2.3 | X2.4 | X2.5 | X2.6 | X2.7 | Total_X ² |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------------|
| X2.1 Pearson Correlation | 1 | .338** | .095 | .278** | .121 | .173 | -.103 | .476** |
| Sig. (2-tailed) | | .001 | .378 | .009 | .261 | .107 | .340 | .000 |
| N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| X2.2 Pearson Correlation | .338** | 1 | .263* | .116 | .085 | .260* | .153 | .539** |
| Sig. (2-tailed) | .001 | | .013 | .281 | .429 | .014 | .155 | .000 |
| N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| X2.3 Pearson Correlation | .095 | .263* | 1 | -.074 | .270* | .630** | .302* | .628** |
| Sig. (2-tailed) | .378 | .013 | | .495 | .011 | .000 | .004 | .000 |
| N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| X2.4 Pearson Correlation | .278** | .116 | -.074 | 1 | .547** | .148 | .108 | .531** |
| Sig. (2-tailed) | .009 | .281 | .495 | | .000 | .170 | .316 | .000 |
| N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| X2.5 Pearson Correlation | .121 | .085 | .270* | .547** | 1 | .416** | .154 | .630** |
| Sig. (2-tailed) | .261 | .429 | .011 | .000 | | .000 | .152 | .000 |
| N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| X2.6 Pearson Correlation | .173 | .260* | .630** | .148 | .416** | 1 | .385* | .740** |
| Sig. (2-tailed) | .107 | .014 | .000 | .170 | .000 | | .000 | .000 |
| N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| X2. Pearson | | | | | | | | | |
| 7 | Correlation | -.103 | .153 | .302** | .108 | .154 | .385** | 1 | .494** |
| | Sig. (2-tailed) | .340 | .155 | .004 | .316 | .152 | .000 | | .000 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Tota | Pearson | | | | | | | | |
| 1_X | Correlation | .476** | .539** | .628** | .531** | .630** | .740** | .494** | 1 |
| 2 | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2t-ailed).

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .658 | 7 |

c. Uji Validitas dan Reliabilitas Kesejahteraan Masyarakat (Y)

جامعة الرانيرى
AR - RANIRY

| Correlations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|------|------|-------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 | y10 | y11 | y12 | y13 | y14 | y15 | y16 | y17 | y18 | y19 | y20 | Total _Y |
| y1 | Pearson Correlation | 1 | .155 | .085 | .026 | .010 | .014 | -.044 | -.133 | .094 | .202 | .181 | .174 | .096 | .165 | .150 | .126 | .245* | .258* | -.004 | -.181 | .358** |
| | Sig. (2-tailed) | | .150 | .430 | .814 | .925 | .900 | .682 | .216 | .383 | .059 | .092 | .106 | .375 | .125 | .164 | .242 | .022 | .015 | .973 | .092 | .001 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| y2 | Pearson Correlation | .155 | 1 | -.136 | -.112 | .107 | .042 | .188 | .117 | -.054 | .258* | .177 | .104 | .264* | .177 | .380** | .116 | .179 | .223* | -.008 | -.036 | .273* |
| | Sig. (2-tailed) | .150 | | .207 | .298 | .323 | .695 | .080 | .278 | .620 | .015 | .099 | .336 | .013 | .099 | .003 | .283 | .093 | .036 | .943 | .742 | .010 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| y3 | Pearson Correlation | .085 | -.136 | 1 | .113 | .134 | -.168 | .080 | .118 | .078 | .194 | .055 | .159 | -.032 | .093 | .003 | .137 | .086 | -.073 | .245* | -.033 | .258* |
| | Sig. (2-tailed) | .430 | .207 | | .295 | .211 | .467 | .270 | .492 | .064 | .612 | .132 | .769 | .399 | .990 | .205 | .427 | .501 | .021 | .762 | .015 | .015 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| y4 | Pearson Correlation | .026 | .112 | .113 | 1 | .091 | -.026 | .093 | .073 | .113 | .083 | .080 | .172 | .217* | .043 | .033 | -.007 | -.067 | .186 | .155 | .029 | .252* |
| | Sig. (2-tailed) | .814 | .295 | .298 | | .369 | .808 | .403 | .498 | .303 | .441 | .458 | .109 | .042 | .692 | .719 | .952 | .538 | .083 | .150 | .789 | .018 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| y5 | Pearson Correlation | .010 | .042 | .134 | .134 | 1 | .167 | .133 | -.265* | .058 | .213 | .038 | .088 | .114 | .024 | .024 | -.074 | .173 | -.067 | -.090 | .218* | |
| | Sig. (2-tailed) | .925 | .323 | .215 | .369 | | .508 | .119 | .216 | .013 | .594 | .043 | .724 | .417 | .287 | .823 | .460 | .480 | .106 | .537 | .404 | .041 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
| y6 | Pearson Correlation | .014 | .042 | .168 | .026 | -.071 | .321 | .096 | .198 | .373** | -.015 | .254* | -.198 | -.161 | -.207 | .166 | .274** | -.009 | -.031 | .109 | .381** |
| | Sig. (2-tailed) | .900 | .695 | .117 | .808 | .508 | .002 | .375 | .065 | .000 | .886 | .017 | .064 | .135 | .053 | .122 | .010 | .937 | .773 | .311 | .000 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| y7 | Pearson Correlation | -.044 | .188 | .080 | .090 | .167 | .321** | .271 | .167 | .213* | .087 | .275** | -.110 | .200 | -.070 | .133 | .330** | .055 | .012 | .168 | .467** |
| | Sig. (2-tailed) | .682 | .080 | .460 | .403 | .119 | .002 | .009 | .120 | .047 | .422 | .010 | .306 | .062 | .518 | .216 | .002 | .610 | .915 | .118 | .000 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| y8 | Pearson Correlation | -.133 | .118 | -.073 | -.133 | .093 | .276** | .371 | .375** | -.125 | .053 | .093 | .241* | -.130 | .308** | -.124 | .085 | .259* | .129 | .070 | .315** |
| | Sig. (2-tailed) | .216 | .278 | .272 | .498 | .216 | .375 | .009 | .005 | .240 | .621 | .387 | .023 | .226 | .004 | .249 | .434 | .015 | .239 | .515 | .003 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| y9 | Pearson Correlation | .094 | -.054 | .074 | .111 | -.265* | .198 | .167 | .375** | .103 | -.108 | .233* | .037 | -.034 | .118 | .147 | .160 | .359** | .217* | -.064 | .343** |
| | Sig. (2-tailed) | .383 | .620 | .496 | .303 | .013 | .065 | .120 | .000 | .905 | .318 | .029 | .730 | .751 | .273 | .171 | .137 | .001 | .042 | .555 | .001 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| y10 | Pearson Correlation | .202 | -.258* | .198 | .083 | .058 | .373** | .213* | -.125 | .013 | .551** | .257* | -.341** | .146 | .429** | .136 | .235* | -.027 | .024 | .071 | .378** |
| | Sig. (2-tailed) | .059 | .015 | .064 | .441 | .594 | .000 | .047 | .245 | .905 | .000 | .016 | .001 | .176 | .000 | .206 | .027 | .804 | .824 | .514 | .000 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| y11 | Pearson Correlation | .181 | -.177 | .055 | .080 | .217* | -.015 | -.087 | -.053 | .108 | .551** | .543** | -.045 | -.011 | -.273* | .003 | .087 | .117 | -.027 | .075 | .335** |
| | Sig. (2-tailed) | .181 | .177 | .055 | .080 | .217 | .015 | .087 | .053 | .108 | .551 | .543 | .045 | .011 | .273 | .003 | .087 | .117 | .027 | .075 | .335 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|------|------|------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Sig. (2-tailed) | .092 | .099 | .612 | .458 | .043 | .886 | .422 | .621 | .318 | .000 | .000 | .675 | .921 | .010 | .976 | .421 | .277 | .803 | .490 | .001 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| y12 | Pearson Correlation | .174 | .104 | .159 | .172 | .038 | .254 | .275 | .093 | .233 | .257 | .543 | .101 | .196 | .075 | .295 | .256 | .261 | .028 | .006 | .602 |
| | Sig. (2-tailed) | .066 | .336 | .139 | .109 | .724 | .017 | .010 | .387 | .029 | .016 | .000 | .398 | .067 | .489 | .005 | .018 | .012 | .798 | .958 | .000 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| y13 | Pearson Correlation | .096 | .264 | .032 | .217 | .088 | -.198 | .110 | .241 | .037 | -.341 | .045 | .091 | .129 | .556 | .105 | .165 | .180 | .217 | .181 | .326 |
| | Sig. (2-tailed) | .375 | .013 | .769 | .042 | .417 | .064 | .306 | .023 | .730 | .001 | .675 | .398 | .232 | .000 | .332 | .124 | .093 | .043 | .093 | .002 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| y14 | Pearson Correlation | .165 | .177 | .093 | .043 | .114 | .161 | .200 | .130 | .034 | .146 | .011 | .196 | .129 | .061 | .272 | .415 | .295 | .247 | .174 | .496 |
| | Sig. (2-tailed) | .125 | .099 | .390 | .692 | .289 | .135 | .062 | .226 | .751 | .176 | .921 | .067 | .232 | .566 | .009 | .000 | .005 | .025 | .100 | .000 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| y15 | Pearson Correlation | .150 | .380 | .000 | .039 | .024 | .204 | .078 | .308 | .118 | .428 | .273 | .075 | .552 | .061 | .191 | .034 | .143 | .254 | .008 | .271 |
| | Sig. (2-tailed) | .164 | .000 | .995 | .719 | .823 | .053 | .518 | .004 | .273 | .000 | .010 | .489 | .000 | .566 | .075 | .751 | .184 | .017 | .939 | .011 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| y16 | Pearson Correlation | .126 | .116 | .137 | -.000 | .080 | .136 | -.124 | .147 | .136 | -.290 | .003 | .276 | .105 | .197 | .321 | .012 | .006 | .001 | .097 | .355 |
| | Sig. (2-tailed) | .424 | .283 | .202 | .952 | .460 | .122 | .216 | .249 | .171 | .206 | .976 | .003 | .335 | .009 | .075 | .002 | .886 | .995 | .367 | .001 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y17 | Pearson Correlation | .245* | .179 | .086 | -.067 | .076 | .274** | .330** | .085 | .160 | .235* | .087 | .251* | .165 | .415** | .034 | .322** | 1 | .248* | -.018 | .268* | .596** |
| | Sig. (2-tailed) | .022 | .095 | .427 | .538 | .480 | .010 | .002 | .434 | .137 | .027 | .421 | .018 | .124 | .000 | .751 | .002 | | .020 | .871 | .012 | .000 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| y18 | Pearson Correlation | .258* | .223* | .073 | .186 | .173 | -.009 | .055 | .259* | .359** | -.027 | .117 | .267* | .180 | .295** | .143 | .016 | .248* | 1 | .303** | -.004 | .515** |
| | Sig. (2-tailed) | .015 | .036 | .501 | .083 | .106 | .937 | .610 | .015 | .001 | .804 | .277 | .012 | .093 | .005 | .184 | .886 | .020 | | .004 | .974 | .000 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| y19 | Pearson Correlation | -.004 | -.008 | .245* | .155 | -.067 | .031 | .012 | .219* | .027 | .024 | .028 | .217* | .243 | .254* | .001 | -.018 | .303** | 1 | .056 | .358** | |
| | Sig. (2-tailed) | .973 | .943 | .022 | .150 | .537 | .773 | .915 | .239 | .042 | .824 | .803 | .798 | .043 | .020 | .017 | .995 | .871 | .004 | | .604 | .001 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| y20 | Pearson Correlation | -.081 | .036 | .033 | .029 | .090 | .109 | .168 | .070 | .064 | .071 | .075 | .006 | .181 | .174 | .008 | .097 | .268* | 1 | .056 | .292** | |
| | Sig. (2-tailed) | .092 | .742 | .763 | .789 | .404 | .311 | .518 | .555 | .514 | .490 | .958 | .095 | .101 | .934 | .936 | .017 | .362 | .014 | | .604 | .006 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Total - Y | Pearson Correlation | .358** | .273* | .258* | .252* | .218* | .381** | .467** | .315** | .343** | .378** | .335** | .602** | .326** | .496** | .271* | .355** | .596** | .515** | .358** | .292** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .001 | .010 | .015 | .018 | .041 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .010 | .000 | .000 | .000 | .000 | .006 | |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |

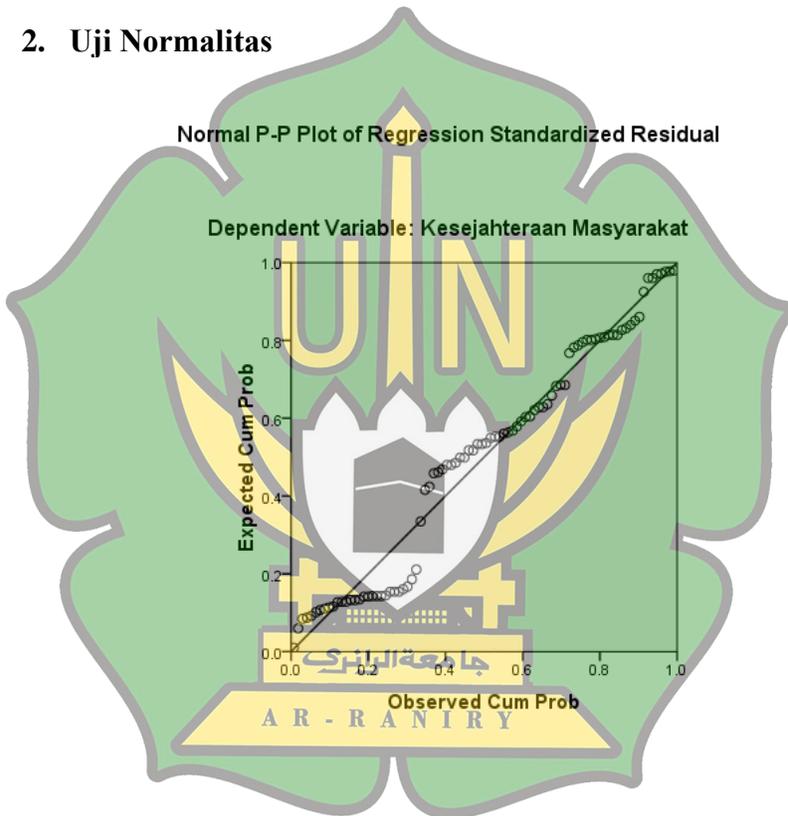
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .653 | 20 |

2. Uji Normalitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 88 |
| Normal Parameters ^a | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | .92888943 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .143 |
| | Positive | .143 |
| | Negative | -.094 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 1.338 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .056 |

a. Test distribution is Normal.

3. Uji Multikolinearitas

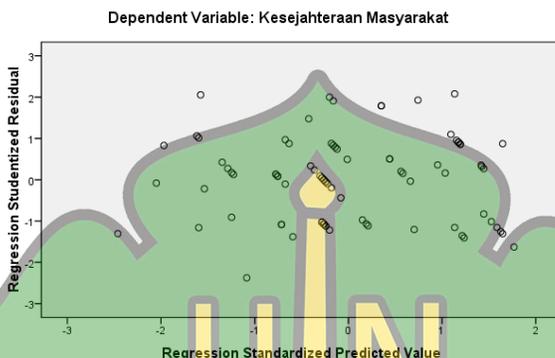
Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | .585 | 2.030 | | .288 | .774 | | |
| | Pengelolaan DD | .044 | .021 | .088 | 2.082 | .040 | .990 | 1.011 |
| | Pembangunan Infrastruktur | .993 | .046 | .908 | 21.391 | .000 | .990 | 1.011 |

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

4. Uji Heteroskedestisitas

Scatterplot



5. Hasil Analisis Linear Berganda

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 64,072 | 8,115 | | 7,895 | <,001 |
| | Pengelolaan DD (X1) | -,032 | ,285 | -,013 | -,111 | ,912 |
| | Pembangunan Infrastruktur (X2) | ,591 | ,278 | ,256 | 2,131 | ,036 |

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat (Y)

6. Uji Parsial (Uji t)

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 64,072 | 8,115 | | 7,895 | <,001 |
| | Pengelolaan DD (X1) | -,032 | ,285 | -,013 | -,111 | ,912 |
| | Pembangunan Infrastruktur (X2) | ,591 | ,278 | ,256 | 2,131 | ,036 |

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat (Y)

7. Uji Simultan (Uji F)

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 148,001 | 2 | 74,001 | 2,836 | ,064 ^b |
| | Residual | 2218,078 | 85 | 26,095 | | |
| | Total | 2366,080 | 87 | | | |

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat (Y)

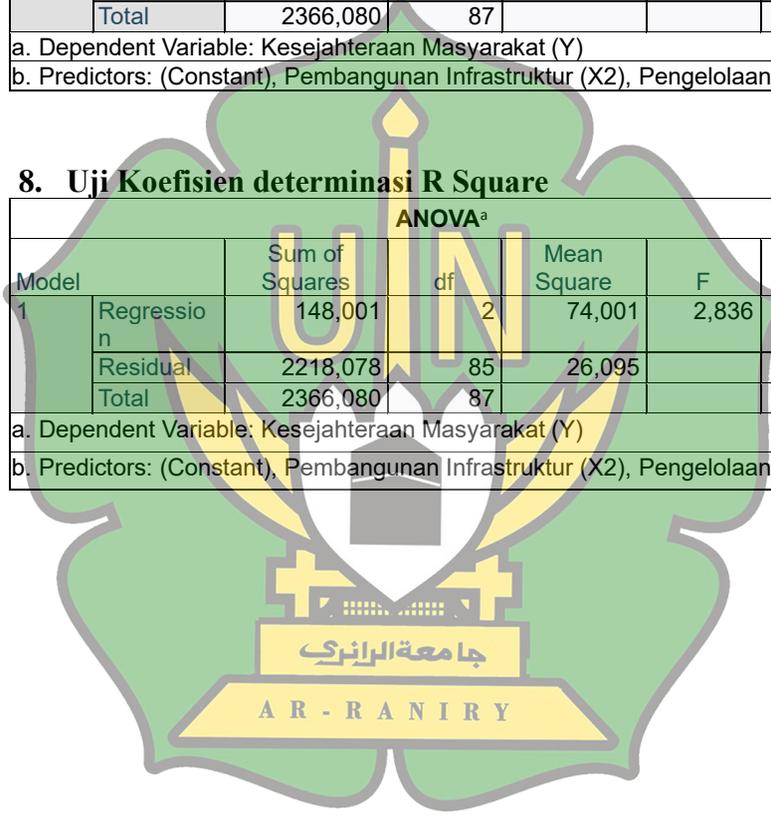
b. Predictors: (Constant), Pembangunan Infrastruktur (X2), Pengelolaan DD (X1)

8. Uji Koefisien determinasi R Square

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 148,001 | 2 | 74,001 | 2,836 | ,064 ^b |
| | Residual | 2218,078 | 85 | 26,095 | | |
| | Total | 2366,080 | 87 | | | |

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat (Y)

b. Predictors: (Constant), Pembangunan Infrastruktur (X2), Pengelolaan DD (X1)



Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian

1. Pembagian Kuesioner



2. Pembangunan Jalan



3. Pembangunan Mushalla Pengajian



4. Pembangunan Jalan menuju Sawah dan Perumahan



5. Pembangunan Irigasi



6. Pembangunan Meunasah



Lampiran 6 Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri

Nama : Intan Putri Zakia
NIM : 200602084
Tempat/ Tgl. Lahir : Banda Aceh, 01 Oktober 2002
Status : Mahasiswa
Alamat : Jl. Turi 1, Cot Mesjid, Lueng Bata, Banda Aceh
No. Hp : 081264615972
Email Student : 200602084@student.ar-raniry.ac.id
Email Pribadi : intanzakia577@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD : 2014
2. SMP : 2017
3. SMA : 2020
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Nirwansyah (Alm.)
Pekerjaan : PNS
Nama Ibu : Radiana
Pekerjaan : PNS (Guru)
Alamat Orang Tua : Jl. Turi 1, Cot Mesjid, Lueng Bata, Banda Aceh